

**PENGARUH KEMISKINAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN**

(Skripsi)

**Oleh
Resilia Salsabila
1951021024**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

THE EFFECT OF POVERTY AND GOVERNMENT SPENDING IN EDUCATION SECTOR ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE SOUTHERN SUMATRA REGION

By

RESILIA SALSABILA

This study aims to determine poverty, government spending in education sector on human development index in the Southern Sumatra Region and their joint effect on the human development index in the Southern Sumatra Region. This research uses the panel data regression method. This study uses secondary data from five regions in Southern Sumatra starting from 2016 to 2021. The results of this study indicate that poverty has a negative and significant effect on the human development index in the Southern Sumatra Region, but government spending on the education sector has a positive and negative effect. significant to the human development index in the Southern Sumatra Region, ceteris paribus. Taken together, poverty and education sector government spending have a significant effect on the human development index in the southern Sumatra Region, ceteris paribus.

Keywords: *Poverty, Government Expenditure in The Education Sector, Human Development Index, The Panel Data Regression.*

ABSTRAK

PENGARUH KEMISKINAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

OLEH

RESILIA SALSABILA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemiskinan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan serta pengaruhnya secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari lima wilayah di Sumatera Bagian Selatan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan, namun pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan, *ceteris paribus*. Secara bersama-sama kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan, *ceteris paribus*.

Kata kunci: Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Indeks
Pembangunan Manusia, Regresi Data Panel

**PENGARUH KEMISKINAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN**

Oleh

RESILIA SALSABILA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

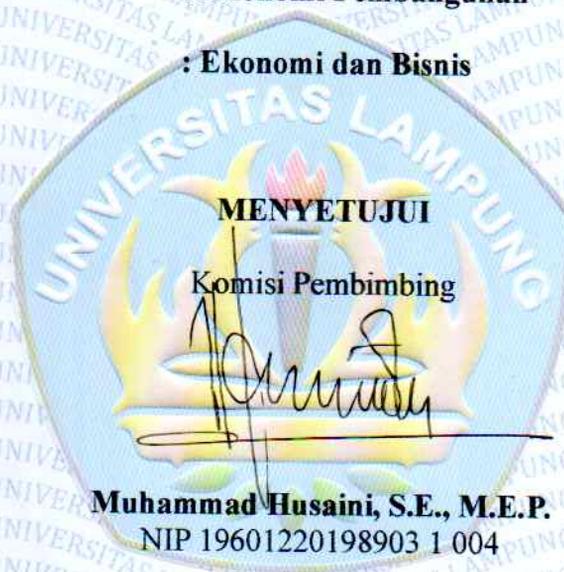
Judul Skripsi : **PENGARUH KEMISKINAN DAN PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH
SUMATERA BAGIAN SELATAN**

Nama Mahasiswa : **Resilia Salsabila**

No. Induk Mahasiswa : **1951021024**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.

NIP 19601220198903 1 004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.

NIP 19631215198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

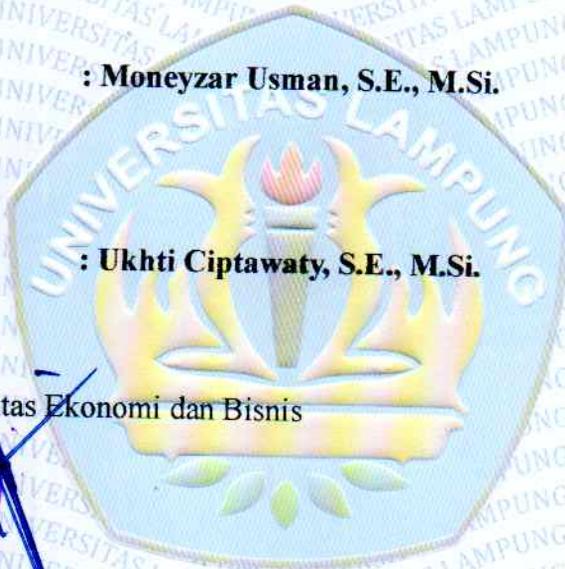
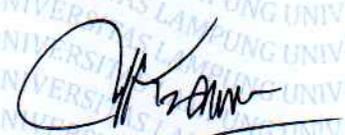
Ketua : **Muhammad Husaini, S.E., M.E.P.**



Penguji I : **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**



Penguji II : **Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si.**



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Oktober 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023

Penulis



Resilia Salsabila

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung pada tanggal 23 April 2001, merupakan anak keempat dari empat bersaudara pasangan Alm. Munyi Alimin dan Marlina.

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang ditamatkan pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang ditamatkan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA YP Unila Bandar Lampung yang ditamatkan pada tahun 2019.

Setelah menyelesaikan jenjang sekolah menengah, penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan pada tahun 2019 dan diterima lewat jalur Mandiri. Selama menjalani kegiatan kuliah penulis tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA), pernah mengikuti Brigadir Muda (Brigmud) BEM FEB pada semester 1, mengikuti organisasi Economic and Business Entrepreneur Club (EBEC) pada semester 1, dan juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar Permata Merdeka dengan Universitas Mulawarman Kalimantan Timur pada Semester 4. Penulis menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(Quran 94:6-7, Surah Al Insyirah)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya derita.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Sujud syukur kupersembahkan kepada Tuhanku Allah SWT atas segala karunia, rahmat, cinta, dan kasih sayang-Nya yang melimpah. Shalawat serta salam juga selalu kupanjatkan bagi suri tauladanku Nabi Muhammad S.A.W.

Dengan kerendahan hati, bersama keridhaan-Mu ya Allah, kupersembahkan karya kecil penuh cinta ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang

Alm. Munyi Alimin

Marlina

Terima kasih atas setiap bait doa, nasihat, dan pelukmu telah menghantarkan diriku menuju hari esok yang cerah. Yang telah mampu menghantarkanku ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk menjadi manusia yang lebih berhasil. Mungkin tak pernah terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku ahmat kalian. Tiada mungkin setiap pengorbanan dapat kubalas dengan apapun selain meminta kepada-Nya yang kuasa posisi terbaik untuk Ayah dan Ibu di Jannah.

Kepada Kakak-kakakku Roni Lahsa Malian, Reni Malisa Fitri, dan Rani Dwifentary yang selalu mendukung dan memberi semangat disetiap proses yang aku jalani.

Kepada Keluarga besar dan sahabat-sahabat tersayang,
Almamater tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana pengasih lagi maha penyayang, yang tiada hentinya memberikan nikmat dan rahmat serta kekuatan kepada Penulis. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perantarnya kita semua bisa merasakan nikmatnya kehidupan.

Dengan berbekal kesabaran, keyakinan, kemauan, dan kerja keras serta dukungan juga doa dari berbagai pihak, dan tak lupa Ridho dari Allah SWT sehingga akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung.

Selama proses menulis skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Seingganya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh Penulis sangat mempermudah proses penyelesaian skripsi ini. Karenanya dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi bagi penulis selama masa perkuliahan.

3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan hingga kelulusan. Serta selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Tiara Nirmala, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
5. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan ilmu, kritik dan saran, arahan, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan.
10. Yang aku cintai dan kasihi Ayah Alm. Munyi Alimin dan Ibu Marlina. Orang Tuaku yang paling hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku, yang selalu mendoakan kesuksesan setiap langkah anak-anaknya, selalu memberikan nasihat serta mengajarkan banyak hal tentang kehidupan yang sesungguhnya, selalu memberikan dukungan moril maupun materil, dan mendengarkan cerita keluh kesah disetiap proses perjalananku. Terima kasih Ayah dan Ibu atas segala usaha terbaik yang telah diberikan kepada Penulis, telah sabar dengan sepenuh hati, menyayangi, dan membesarkan penulis. Terima kasih Ayah sudah berjuang dan kuat atas sakit nya selama ini dan sekarang Ayah sudah tidak merasakan sakit lagi. Terima kasih Ayah sudah menunggu Penulis

sampai selesai pendidikan, maaf belum bisa dapat wisuda lebih cepat sehingga Ayah belum sempat melihat Penulis sampai wisuda walaupun memang penulis tahu bahwa Ayah menunggu waktu itu tiba. Terima kasih Ayah atas didikan keras yang selama ini Ayah berikan kepada anak-anak Ayah agar kami mencapai kesuksesan satu persatu. Penulis menyadari di setiap perjalanan Penulis hingga saat ini ajaran yang Ayah berikan sangat berguna bagi Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ahmat an dan limpahan ahmat kepada Ibu. Semoga kedepannya Penulis dapat menjadi anak yang sukses dan membanggakan bagi Ayah dan Ibu dan semoga atas apa yang selama ini Ayah dan Ibu ajarkan kepada Penulis dapat Penulis pergunakan dengan baik. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas semua yang Ayah dan Ibu telah berikan kepada Penulis, maka dari itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kedua Orang Tuaku.

11. Kakak-kakakku tersayang, Roni Lahsa Malian, Reni Malisa Fitri, dan Rani Dwifentary, yang selalu memberikan semangat, perhatian dan dukungannya kepada Penulis. Serta kakak ipar dan keponakanku, kaka Nawal dan Queen. Terima kasih atas segala dukungannya kepada Penulis, semoga kelak dapat menjadi orang yang sukses dan memberikan manfaat dikemudian hari.
12. Seluruh keluarga besar Sarawi dan Rami Abdullah di Bandar Lampung, Jakarta, dan Bekasi yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengenyam pendidikan.
14. Sahabatku Grumpy yaitu Cut Marisa Zahara, Anindya Permata Rahmadini, Bunga Salsabila, dan Dwiva Noerfitri Salim. Terima Kasih yang selalu ada dan selalu siap mendengarkan serta berbagi keluh kesah selama Penulis membutuhkan, semoga kita tetap bersama hingga tua.
15. Sahabatku Be Yourself yaitu Rara, Nisa, Fara, Nada, Ica, Dendi, Reza, Ade, Arifi, dan Adjie. Terima Kasih yang selalu ada dan selalu siap mendengarkan serta berbagi keluh kesah selama Penulis membutuhkan, semoga kita tetap bersama hingga tua.

16. Sahabatku Nabila dan Diah. Terima Kasih yang selalu ada dan selalu siap mendengarkan serta berbagi keluh kesah selama Penulis membutuhkan, semoga kita tetap bersama hingga tua.
17. Sahabatku TMS yaitu Fera Apriana, M. Rafly Arahman, M. Azril Hakim, Dwi Reksa Winata, dan Rian Ramanda. Terima Kasih yang selalu ada, siap membantu dan direpotkan setiap seminar sampai ujian hingga saat ini, semoga kita tetap bersama hingga tua.
18. Sahabat seperjuanganku selama masa perkuliahan hingga kelulusan ini (Miss Indipindin) Austine Rahmadiani, Shafa Marwa, Dirga Adi Chandra, dan Muhamad Derry Andian. Terima kasih karena selalu siap membantu dan saling memberikan motivasi dalam menjalani kehidupan kuliah ini.
19. Teman-teman YOLO yang selalu kompak sejak MABA yaitu Shantika Amanda, Kholis Daffa Hanifa, Yolanda Gorety, Devis Anezza, Toyo, Kemal dan teman-teman lainnya.
20. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2019 yang siap saling membantu setiap Penulis memiliki kesulitan dalam perkuliahan yaitu Ses Intan, Atu Dhea, Yaya, Fia, Atu Icha, Deandra dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
21. Teman-teman Always Gabut yang selalu solid sampai saat ini yaitu Putri Yudini, Talitha Ahlam Demiry, dan Nurul Huda Rizky Ukasah.
22. Teman-teman Nostalgia SMP yang selalu solid sampai saat ini yaitu Debby, Apriannisa, Lela, Intan, Zaqia, dan Annisa Sarah.
23. Teman-teman Soshum KSM yang selalu solid sampai saat ini yaitu Amel, Ranis, Farel, dan Alung.
24. Teman-teman KKN Keteguhan yang selalu solid sampai saat ini yaitu Peha, Cindi, Ona, Rizal, Gaizka, dan Bintang.
25. Berbagai pihak lainnya yang ikut serta membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
26. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me every time.

Akhir kata, sepenuhnya Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembacanya. Semoga segala dukungan, bimbingan dan doa yang diberikan kepada Penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin YRA.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023

Penulis

Resilia Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Masalah.....	14
D. Manfaat Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Indeks Pembangunan Manusia	16
1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia	16
2. Teori Pembangunan Manusia	17
3. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia	17
4. Tujuan Indeks Pembangunan Manusia	19
5. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia	19
B. Kemiskinan	22
1. Pengertian Kemiskinan	22
2. Teori Kemiskinan	24
3. Indikator Kemiskinan	24
4. Macam-macam Kemiskinan	25
5. Penyebab Kemiskinan.....	25
6. Kesejahteraan Masyarakat	28
C. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan.....	28
1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	28
2. Teori Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan.....	31
3. Peran dan Fungsi Pemerintah	32
4. Macam-Macam Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah.....	33
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah	33
D. Hubungan Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	33
1. Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia....	33
2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	34
E. Penelitian Terdahulu	36

F. Kerangka Pemikiran.....	39
G. Hipotesis Penelitian	40
III. METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Sumber Data.....	41
B. Definisi Operasional Variabel.....	41
C. Wilayah Penelitian	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis Statistik Deskriptif	52
B. Hasil Uji Regresi Data Panel	53
1. Uji Spesifikasi Model	53
2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	55
C. Uji Asumsi Klasik.....	56
1. Uji Multikolinearitas.....	57
2. Uji Heteroskedastisitas	57
D. Uji Hipotesis	58
1. Uji t (Secara Parsial)	58
2. Uji F (Secara Simultan)	59
E. Koefisien Determinasi (R^2).....	59
F. Nilai Individual Effect	60
G. Pembahasan Hasil Penelitian	73
1. Pengaruh Kemiskinan Terhadap indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.....	74
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Bagian Selatan	76
H. Implikasi Kebijakan	81
V. KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 1. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2016-2021 (dalam persen).....	3
Table 2. Perbandingan IPM Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2016-2021 ...	4
Table 3. PDRB Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara.....	5
Table 4. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sumbagsel Tahun 2016-2021 (dalam persen).....	9
Table 5. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Pendidikan di Wilayah Sumbagsel Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)	12
Table 6. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM.....	20
Table 7. Penelitian Terdahulu	36
Table 8. Deskripsi Data.....	41
Table 9. Analisis Statistik Deskriptif	52
Table 10. Uji Chow	54
Table 11. Uji Hausman	54
Table 12. Hasil Regresi Model FEM	55
Table 13. Uji Multikolinearitas	57
Table 14. Uji Heteroskedastisitas.....	57
Table 15. Uji t (secara parsial)	58
Table 16. Uji F (Secara Simultan).....	59
Table 17. Nilai Individual Effect	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. IPM dalam 5 Wilayah di Sumatera Bagian Selatan (dalam persen)	6
Gambar 2. Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	13
Gambar 3. Diagram Perhitungan IPM	21
Gambar 4. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	27
Gambar 5. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 6. Persentase Kemiskinan di Pulau Sumatera	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Paradigma pembangunan baru merupakan fenomena ekonomi yang terdokumentasi dengan baik bahkan sebelum tahun 1970, seperti yang ditunjukkan oleh Todaro & Smith, (2003). Pendapatan, modal, pembangunan ekonomi, dan topik terkait moneter lainnya mendominasi dialog publik selama periode tertentu. Namun, fenomena sosial muncul seiring dengan pertumbuhannya dan sering kali bertentangan dengan fenomena ekonomi. Terdapat bukti bahwa beberapa negara dengan kemajuan ekonomi yang cepat juga mempunyai pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya yang signifikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran mengenai kinerja penduduk setempat dalam hal kesejahteraan materi, pencapaian pendidikan, dan kesehatan menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jika suatu negara hanya diukur dari PDB-nya, maka upayanya dalam meningkatkan pembangunan manusia, seperti tingkat kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan penduduknya, belum bisa dikatakan berhasil. Di sinilah indeks pembangunan berperan sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara. HDI memperhitungkan data ekonomi dengan metrik seperti melek huruf, harapan hidup, dan ketimpangan pendapatan. Tingkat pendidikan, kesehatan, dan keamanan finansial suatu penduduk mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya (BPS, 2022).

Pembangunan manusia adalah gagasan yang memperhitungkan seperti pendapatan serta faktor-faktor termasuk kesehatan dan pendidikan. Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan dalam laporan yang diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990. UNDP menekankan pentingnya manusia sebagai sumber daya utama bangsa dalam

laporannya. Dalam pengertian ini, pembangunan manusia melihat perkembangan individu sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan adalah empat faktor terpenting dalam pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan kondisi yang mendukung umur panjang, kesehatan, dan produktivitas manusia (Arisman, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi modern karena pembangunan manusia yang baik akan memungkinkan faktor-faktor produksi menjadi maksimal. Penduduk yang berkualitas akan mampu melakukan inovasi untuk mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain itu pembangunan manusia yang tinggi juga mengakibatkan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga bertambahnya jumlah tenaga kerja akan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya (Nisa et al., 2023).

Pemerintah Indonesia sangat mementingkan pelatihan dan pendidikan masyarakatnya. Meningkatkan kecerdasan nasional dan memperbaiki kondisi sosial adalah dua tujuan yang dicanangkan Indonesia terdapat alinea ke empat UUD 1945. Pembangunan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat di atas segalanya (Ciptawaty et al., 2023).

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar provinsi kini masuk dalam kategori “sedang” atau “Pembangunan Manusia di Tingkat Regional Sedang”. Sebab, rata-rata angka IPM nasional berada pada kisaran 0,50 hingga 0,79 (BPS, 2022).

Di antara benua Asia dan Oseania, Indonesia adalah negara terbesar di dunia sekaligus kepulauan terbesar. Indonesia dipandang sebagai bangsa yang terletak di dua benua dan di antara samudra Pasifik dan Hindia. Kepulauan Indonesia yang memiliki ribuan pulau kemudian dibagi menjadi delapan kelompok: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua. Namun demikian, Sumatera menduduki peringkat sebagai pulau terbesar keenam di dunia berdasarkan wilayah. Pulau yang membelah pulau Sumatera menjadi Sumatera bagian utara dan selatan yang membentang dari barat laut ke tenggara dan

melintasi garis khatulistiwa. Bagian utara pulau yang disebut Sumbagut terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Sedangkan bagian Selatan pulau yang disebut Sumbagsel terdiri dari Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung (Teniwut, 2022 ; Kementerian PUPR, 2017).

Untuk mengetahui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut :

Table 1. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2016-2021 (dalam persen)

Negara	Indeks Pembangunan Manusia (%)						Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	71,42

Sumber: bps.go.id tahun 2016-2021

Pada Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dicapai oleh Negara Indonesia termasuk berstatus kategori “tinggi” dengan capaian nilai $70 \leq IPM \leq 80$. Dilihat dari capaian IPM bahwa situasi pembangunan manusia di Indonesia dapat ditinjau dari perspektif kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mengalami eskalasi. Nilai IPM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai nilai 72,29. Jadi, tingkat pencapaian pembangunan manusianya dapat dikatakan sekitar 72,29% dari kondisi pembangunan manusia yang seimbang (IPM seimbang = 100). Dan rata-rata IPM pada Negara Indonesia sebesar 71,42%.

Menurut World Bank (2016), Pulau Sumatera, salah satu pulau di Indonesia, sudah siap untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menyerap investasi dan sumber daya untuk ekspansi ekonomi, sehingga berpotensi melampaui Pulau Jawa dalam hal pembangunan dan kemajuan ekonomi. Pembangunan manusia di Pulau Sumatera dinilai cukup unggul dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, meski masih kalah dibandingkan Pulau Jawa. Sebaliknya, pembangunan manusia di Sumatera tumbuh sedikit setiap tahunnya. Pulau Sumatera dibagi menjadi dua bagian yaitu Sumatera Bagian Utara dengan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Sumatera Bagian Selatan yang terdiri dari Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mengetahui perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut :

Table 2. Perbandingan IPM Pulau Jawa dan Pulau Sumatera Tahun 2016-2021

	Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pulau Jawa	DKI Jakarta	79,60	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	80,46
	Jawa Barat	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45	71,44
	Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	71,23
	DIY	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	79,50
	Jawa Timur	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14	71,02
	Banten	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	72,49
	Aceh	70,00	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18	71,31
Pulau Sumatera	Sumatera Utara	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	71,21
	Sumatera Barat	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	71,85
	Riau	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	72,35
	Jambi	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	70,74
	Sumatera Selatan	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	69,46
	Bengkulu	69,33	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	70,70
	Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	69,01
Kepulauan Bangka Belitung	Riau	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	70,78
	Kepulauan Bangka	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	75,02
	Belitung							

Sumber: bps.go.id tahun 2016-2021

Pada Tabel 2 diatas memperlihatkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Indonesia Bagian Barat terutama pada Pulau Sumatera termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Pada nilai IPM tertinggi tahun 2021 berada di Pulau Jawa Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,11% dengan nilai rata-rata sebesar 80,46, sedangkan nilai IPM terendah berada di Pulau Sumatera Provinsi Lampung sebesar 69,90% dengan nilai rata-rata sebesar 69,01.

Table 3. PDRB Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara

Sumatera Bagian Selatan		Sumatera Bagian Utara	
Provinsi	PDRB 2022 (Rp)	Provinsi	PDRB 2022 (Rp)
Jambi	161,717	Aceh	140,947
Lampung	257,534	Sumatera Utara	573,528
Kepulauan Bangka Belitung	57,803	Riau	529,532
Sumatera Selatan	343,483	Kep. Riau	190,163
Total	870,453	Total	1,616,799
Rata-rata	174,090	Rata-rata	323,359

Sumber: bps.go.id tahun 2022

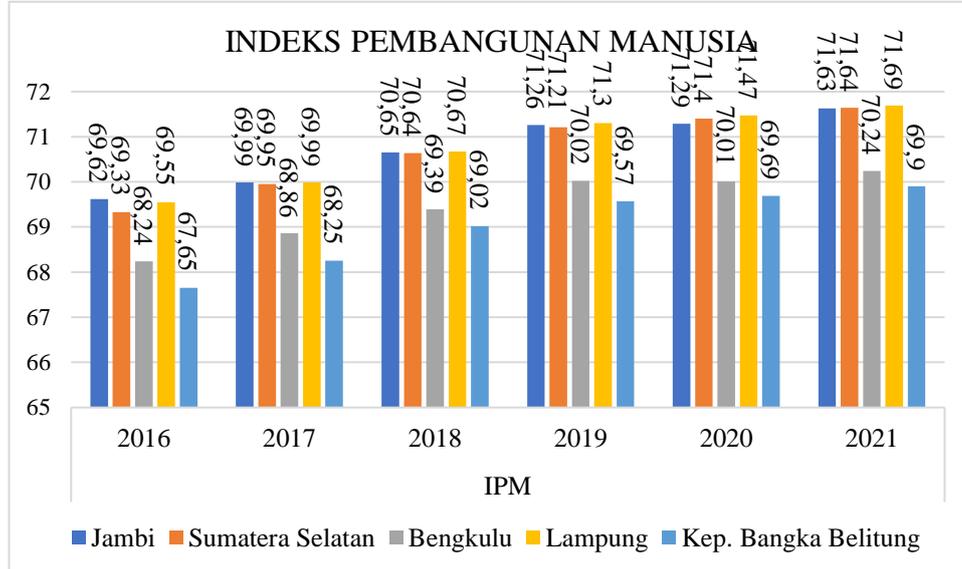
Pulau Sumatera terdiri dari dua bagian yaitu Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara, dari Tabel 3 menunjukkan bahwa Sumatera Bagian Utara memiliki total PDRB sebesar 1,616,799 milyar rupiah. Sedangkan Sumatera Bagian Selatan memiliki total PDRB hanya sebesar 870,453 milyar rupiah. Terdapat perbedaan total PDRB yang signifikan antara dua wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara. Sumatera Bagian Selatan merupakan bagian dari Pulau terbesar kedua di Indonesia namun memiliki IPM dan PDRB yang rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Menurut Mahatma Gandhi (dalam Apriani, 2022), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) baru mencapai 70,29%. Angka ini mendekati IPM Nasional sebesar 71,94%. Namun, angka itu masih lebih rendah dibandingkan IPM Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) sebesar 72,34%.

Pembangunan ekonomi sebagian besar difokuskan pada pembangunan manusia. Gambar 1 menunjukkan evolusi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima wilayah di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Menurut data resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Bagian Selatan, Wilayah di Sumatera Bagian Selatan ini mengalami masalah karena Pulau Sumatera memiliki IPM yang buruk. Provinsi Lampung memiliki IPM tertinggi (71,69%), diikuti Sumatera Selatan (71,64%),

dan Jambi (71,63%). Pada tahun 2016-2021 Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1. IPM dalam 5 Wilayah di Sumatera Bagian Selatan (dalam persen)



Sumber: bps.go.id tahun 2016-2021

Pada Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia yang diraih oleh Wilayah Sumbagsel berstatus kategori “tinggi” dengan capaian nilai $70 \leq IPM \leq 80$ namun IPM pada Wilayah Sumbagsel mengalami fluktuatif. Dilihat dari capaian IPM, peningkatan pembangunan manusia di wilayah Sumbagsel dapat disaksikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada tahun 2021, nilai IPM Provinsi Jambi naik menjadi 71,63. Oleh karena itu, masih dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian pembangunan manusia sekitar 71,63% dari kondisi pembangunan manusia yang seimbang (IPM ideal = 100). Diikuti pada Provinsi Bengkulu tahun 2021 mencapai angka 70,24%. Lalu, pada Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 mencapai angka 71,64%, namun di tahun 2020 terjadinya penurunan 0,01 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai angka 69,90%, pada Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai angka 71,69%. Bagaimanapun pencapaian angka tertinggi tersebut, tidak memungkinkan untuk mengisolasi peran pemerintah dari tingkat IPM yang tinggi dan rendah, karena pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan ekonomi.

Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia pada Wilayah Sumbagsel yang menempati posisi tertinggi adalah Provinsi Lampung sebesar 70,78% sedangkan menduduki posisi terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 69,01%. Faktor IPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan nilai IPM setiap tahunnya. Peningkatan kualitas hidup masyarakat bergantung pada komitmen pejabat pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan median masyarakat.

Kemiskinan merupakan hambatan besar bagi kemajuan karena kemiskinan menghalangi masyarakat untuk berinvestasi pada diri mereka sendiri dan masa depan mereka dengan mengabaikan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Dari sudut pandang ekonomi, hal ini akan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan, mungkin, rendahnya tingkat produksi. Selain itu, masalah ini akan menyebabkan berkurangnya keuntungan finansial. Oleh karena itu, kualitas masyarakat secara keseluruhan akan menurun jika terdapat kemiskinan yang meluas dan akses yang tidak memadai terhadap kebutuhan. Akibatnya, indeks pembangunan manusia diperkirakan akan turun jika jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem meningkat. Hal ini semakin meningkatkan kesenjangan pembangunan manusia di antara keduanya, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mencapai tujuan pencapaian HDI (Mirza, 2012 ; Syahputra M, 2019).

Kemiskinan adalah fenomena rumit yang melampaui ketidakmampuan dan ketidakberdayaan orang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar mereka. Jika tidak diatasi, hal ini akan menghambat potensi generasi mendatang dalam mempengaruhi agenda sosial dan politik serta mengganggu hasil pembangunan. Menurut klaim tersebut, kemiskinan seperti jalan berlumpur berbentuk spiral yang sulit untuk keluar bahkan lebih besar kemungkinannya seseorang akan jatuh lebih jauh ke bawah. Untuk keluar dari jalur berlumpur, dibutuhkan waktu yang lama dan kerja keras (Rayhan, 2020).

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Jika dilihat dari status masyarakat, terlihat

bahwa masyarakat masih berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah, dimana individu mempunyai tingkat pendapatan dan konsumsi yang rendah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup seperti pangan, perumahan, layanan kesehatan, dan lain-lain. dan pendidikan. Oleh karena itu, Indonesia telah menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah. Karena keragaman fisik dan demografi Pulau Sumatera, sepuluh provinsi di Pulau Sumatera mempunyai tantangan dan tingkat kemiskinan yang unik, beberapa di antaranya lebih parah dibandingkan yang lain, misalnya di Sumatera Bagian Selatan (Manurung, 2022).

Berdasarkan ukuran kemiskinan seperti angka kemiskinan, wilayah Sumatera Bagian Selatan merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Jika mempertimbangkan kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kekayaan lainnya, Provinsi Sumatera Bagian Selatan adalah pilihan yang tepat. Karena kekayaan sumber dayanya, Sumatera Bagian Selatan merupakan daerah yang makmur. Tiga penggerak perekonomian terpenting di wilayah ini adalah pertanian, perdagangan, dan pertambangan (khususnya gas, yang terkenal di Sumatera Bagian Selatan dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang berlokasi di sana). Walaupun daerah-daerah tertentu di Sumatera Bagian Selatan mempunyai lebih banyak uang dan industri yang lebih baik dibandingkan daerah lain, hal ini tidak selalu berarti bahwa masyarakat yang tinggal di sana lebih baik (Manurung, 2022).

Gambaran kemiskinan yang telah disajikan memberikan petunjuk tentang tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menaikkan IPM. Mengingat perbedaan pendapatan yang besar dalam populasi dan kerentanan yang signifikan terhadap kemiskinan, implementasi sejumlah program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah merupakan indikasi kuat dari komitmennya untuk melakukannya dengan benar.

Untuk mengetahui perkembangan pada persentase kemiskinan di Wilayah Sumatera Bagian Selatan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4, sebagai berikut :

Table 4. Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sumbagsel Tahun 2016-2021 (dalam persen)

No	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)						Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jambi	8,41	8,19	7,92	7,60	7,58	8,09	7,91
2.	Bengkulu	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22	15,61
3.	Sumatera Selatan	13,54	13,19	12,80	12,71	12,66	12,84	12,80
4.	Kep. Bangka Belitung	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53	4,90	4,88
5.	Lampung	14,29	13,69	13,14	12,62	12,34	12,62	12,89

Sumber: bps.go.id tahun 2016-2021

Pada Tabel 4 menunjukkan persentase kemiskinan di tiap-tiap Wilayah Sumatera Bagian Selatan terus menurun namun di tahun 2021 terjadi peningkatan persentase kemiskinan. Pada rata-rata persentase penduduk miskin bahwa yang menduduki posisi tertinggi pada Provinsi Bengkulu sebesar 15,22% dan menduduki posisi terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,90%. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan manusia, masih perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih besar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di setiap provinsi. Menurut konsep ini, kerawanan pangan didefinisikan sebagai tidak adanya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan dan papan. BPS menggunakan dua ukuran dalam menentukan hal ini: garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan alokasi APBD yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sangat penting bagi terciptanya pembangunan manusia. Pendidikan, layanan kesehatan, dan sektor tambahan lainnya mendapatkan pendanaan dari pemerintah federal dan negara bagian karena upaya mereka untuk membentuk sumber daya manusia memiliki dampak terbesar terhadap pembangunan. Pemaksimalan sumber pendapatan daerah dapat dilakukan melalui APBD, dan kemudian dana tersebut dapat dialokasikan pada program dan

kegiatan yang dipilih daerah. Karena masyarakat berperan aktif dan pasif dalam proses pembangunan, maka pemerintahlah yang melaksanakan pembangunan (Syahputra M, 2019).

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia, baik tinggi maupun buruk, terkait erat dengan inisiatif pembangunan nasional dan daerah. Karena saat ini tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia, sering kali terjadi kesenjangan pembangunan. Penyediaan belanja pembangunan untuk infrastruktur publik di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, dan lain-lain merupakan contoh penggunaan alat kebijakan fiskal oleh pemerintah untuk memenuhi tugas ini. Ketika dana dari pemerintah federal atau negara bagian dikucurkan untuk pendidikan, hal ini terjadi karena para pejabat menyadari perlunya memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada warga negaranya. Semakin besar kapasitas suatu masyarakat dalam mempengaruhi kinerjanya, maka akan semakin mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan keadaan perekonomian negara tersebut (Syahputra M, 2019).

Berdasarkan teori *human capital* dikatakan bahwa pendidikan formal merupakan unsur terpenting dalam menciptakan masyarakat dengan produktivitas tinggi, dan bahwa pengakuan ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh anggota masyarakat. Pemerintah harus mampu berinvestasi dalam pendidikan dengan menciptakan infrastruktur yang kokoh untuk sekolah.

Menurut Ritonga, (dalam Mongan, 2019), dalam rangka membantu bangsa mencapai tujuannya, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk membantu masyarakat dalam bidang pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Pengeluaran di tiga bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur menggambarkan dedikasi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Sumber daya manusia yang berkualitas, seperti yang dihasilkan melalui investasi di sektor kesehatan dan pendidikan, sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan layanan berkualitas tinggi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung IPM menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia dan laju pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan aspek-aspek yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan melalui belanja publik ini akan digunakan sebagai indikator bagaimana rencana pemerintah daerah dilaksanakan (Zulham et al., 2017).

Menurut Mangkoesobroto, (2016), membela anggaran pemerintah dengan menyatakan bahwa kebijakan menentukan pengeluaran. Harga yang harus dibayar untuk pengambilan kebijakan pemerintah ada pada pembayar pajak. Ini merupakan pengeluaran pemerintah karena berasal langsung dari anggaran pemerintah. Penyaluran dana tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun sejalan dengan tujuan pembangunan masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan otonomi daerah yang berlaku sejak dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah sangat bergantung pada APBN dan APBD. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang diamandemen pada tahun 2009, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, negara harus mengalokasikan minimal 20% anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan. Pengalokasian dana pendidikan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49.

Untuk mengetahui perkembangan anggaran pemerintah pada bidang Pendidikan tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5, sebagai berikut :

Table 5. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Pendidikan di Wilayah Sumbagsel Tahun 2016-2021 (Milyar Rupiah)

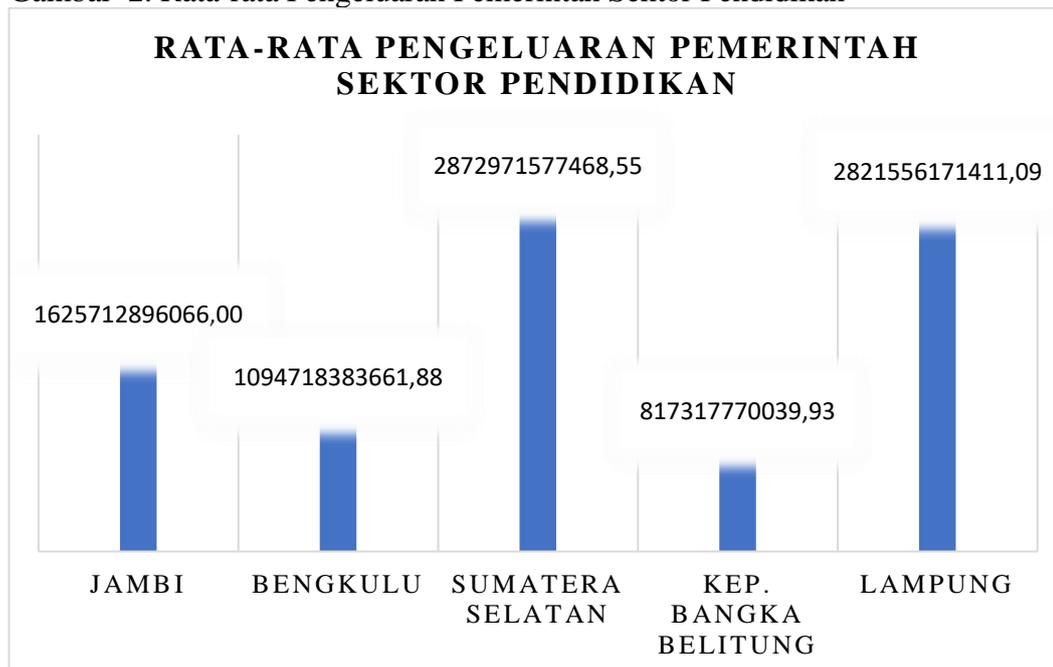
No	Provinsi	Pendidikan (Milyar Rupiah)						Rata-rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jambi	210.93	1.385.11	1.507.81	1.653.98	1.681.741	1.688.9	1.625.71
		3.145.8	1.285.40	2.529.33	0.458.76	.407.007,	85.653.	2.896.06
		27	9	2	6	77	990,15	6
2	Bengkulu	134.92	679.960.	1.034.08	1.070.75	1.681.741	872.12	1.094.71
		4.078.9	492.933	3.730.47	5.069.11	.407.008	7.139.8	8.383.66
		33		6	8		41,27	1,88
3	Sumatera Selatan	130.16	1.597.16	2.957.80	3.024.48	3.293.576	3.361.6	2.872.97
		1.690.4	4.563.52	6.873.31	1.333.67	.426.130	67.000.	1.577.46
		22	9	1	6		275	8,55
4	Kep. Bangka Belitung	75.682.	671.380.	692.530.	832.044.	994.127.1	820.82	817.317.
		855.83	942.258	146.971,	950.475,	05.040	2.849.6	770.039,
		4		48	81		21	93
5	Lampung	195.15	2.530.95	2.693.36	2.757.05	3.003.290	2.927.9	2.821.55
		1.576.0	0.211.14	0.190.65	6.389.56	.487.789,	72.001.	6.171.41
		15	8	7	4	63	881	1,09

Sumber: DJPK, Menkeu tahun 2016-2021

Pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa pada tahun 2016-2021 belanja pemerintah pusat dalam fungsi Pendidikan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 Provinsi Jambi termasuk kategori tinggi sebesar 1.688.985.653.990,15 sedangkan berkategori rendah berada di Provinsi Lampung sebesar 2.927.972.001.881.

Pada rata-rata belanja pemerintah pusat dalam fungsi pendidikan bahwa yang menduduki posisi tertinggi pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2.872.971.577.468,55 sedangkan posisi terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 817.317.770.039,93. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor publik untuk inisiatif pembangunan manusia. Namun keberhasilan upaya tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, melainkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Gambar 2. Rata-rata Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan



Sumber: bps.go.id tahun 2016-2021

Gambar 2 merupakan gambar yang menunjukkan rata-rata pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Berdasarkan Gambar 2 nilai rata-rata pengeluaran pemerintah terendah di Wilayah Sumatera Bagian Selatan berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 817,3 miliar rupiah yang mana hanya sebesar 2,30% dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan nilai rata-rata tertinggi berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai rata-rata pengeluaran pemerintah sektor pendidikan 2,8 triliun rupiah atau sebesar 8,09% dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Menurut UU No. 20 tahun 2003 mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan setidaknya sebesar 20%, nilai rata-rata pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Wilayah Sumatera Selatan belum mendekati angka yang dianjurkan oleh UU tersebut.

Dari penjabaran diatas, penurunan kemiskinan pada daerah Sumatera Bagian Selatan tidak diikuti dengan peningkatan IPM. Sumatera Bagian Selatan merupakan provinsi-provinsi yang berada di bagian selatan Pulau Sumatera. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang berada di bagian utara Pulau Sumatera, Sumbagsel memiliki IPM yang rendah. Hal tersebut yang memotivasi

penulis, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini akan menganalisis perkembangannya menurut indikator-indikator yang ada dalam indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

2. Penelitian ini akan mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
3. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran pembangunan manusia di 5 Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup semuanya diukur dan dibandingkan secara global menggunakan sesuatu yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (Harahap, 2011). HDI adalah sebuah konsep yang awalnya diluncurkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990. Proyek ini ingin mengintegrasikan indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli (Kuncoro, 2011 ; UNDP, 1990). IPM merupakan alternatif indikator pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto (Usmaliadanti, 2011).

Dengan menggunakan pemikiran tersebut di atas, HDI membandingkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara industri dan berkembang. Selain itu, HDI adalah cara yang berbeda untuk mengukur kemajuan daripada metrik lainnya dan menilai bagaimana kebijakan ekonomi negara berdampak pada kualitas hidup masyarakat.

Untuk menilai kualitas hidup sumber daya manusia suatu bangsa, IPM menggabungkan indeks daya beli, indeks pendidikan, dan indeks harapan hidup. HDI dibangun dengan menggunakan metode fundamental tiga dimensi sebagai ukuran kualitas hidup. Ciri-ciri tersebut antara lain umur panjang, gaya hidup sehat, pendidikan, dan taraf hidup yang layak (UNDP, 1990).

Badan Pusat Statistik mengklaim bahwa HDI terdiri dari tiga komponen yang mudah dihitung yang signifikan dari perspektif manusia, operasional dan menunjukkan upaya untuk memajukan pembangunan manusia. Hal ini

menunjukkan bahwa IPM menggunakan beberapa aspek mendasar dari kualitas hidup untuk menilai suatu pencapaian pembangunan manusia (BPS, 2022).

2. Teori Pembangunan Manusia

Menurut Becker S, (1993), bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi.

3. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia

a. Angka Harapan Hidup

Usia rata-rata yang akan dicapai suatu populasi dalam jumlah waktu tertentu dikenal sebagai harapan hidup. BPS 2022 mendefinisikan harapan hidup sebagai perkiraan jumlah tahun yang mungkin diharapkan seseorang untuk hidup. Oleh karena itu, angka harapan hidup rata-rata penduduk dapat digunakan untuk menghitung angka harapan hidup sejak lahir.

Meskipun sulit untuk mendapatkan informasi tentang orang yang sudah meninggal, harapan hidup dihitung secara tidak langsung (*Metode Brass, Varian Trussel*). Kelahiran dan kelangsungan hidup anak dari perempuan menikah merupakan statistik dasar yang diperlukan untuk menggunakan metode standarisasi harapan hidup dengan menggunakan nilai maksimum dan minimum (Usmaliadanti, 2011).

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkap sejumlah faktor yang mempengaruhi umur panjang. Ini termasuk : (BPS, 2022)

- 1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
- 2) Rata-rata lama sakit (hari).
- 3) Angka terjadinya kontraksi (%)
- 4) Persentase pemberian ASI
- 5) Rata-rata bayi disusui (Bulan)

Karena faktor-faktor yang dibahas di atas, pemerintah didorong untuk menerapkan inisiatif kesehatan, seperti inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik yang dapat memperpanjang umur warganya.

b. Tingkat Pendidikan

Indeks pembangunan didasarkan pada kombinasi jumlah rata-rata tahun yang dihabiskan penduduk di sekolah dan jumlah tahun yang diperkirakan akan dihabiskan penduduk di sekolah. "Tahun sekolah yang diharapkan" mengukur berapa tahun sekolah yang diharapkan akan diselesaikan oleh seorang siswa pada saat mereka mencapai usia tertentu. Untuk siswa yang berusia di atas 7 tahun, tergantung pada tahun pendidikan yang diharapkan.

Kelompok usia tertentu menawarkan anak-anak berkesempatan untuk tetap bersekolah, dan penduduk saat ini juga memiliki kesempatan untuk bersekolah pada usia tersebut. Penduduk berusia 15 tahun ke atas menghabiskan rata-rata tahun dalam pendidikan formal, menurut rata-rata sekolah. Bobot ketiga diberikan untuk setiap metode perhitungan (BPS, 2022).

c. Standar Hidup Layak

Kesejahteraan yang diupayakan oleh masyarakat sebagai akibat ekonomi yang berkembang didefinisikan sebagai taraf hidup yang layak di wilayah yang cukup luas (BPS, 2022). Indeks ini menggambarkan kemampuan yang dibutuhkan individu atau keluarga untuk menjalani kehidupan yang layak (Irfan, 2016).

Program Pembangunan PBB menggunakan GNP aktual setelah penyesuaian untuk mengukur standar hidup (daya beli). Angka PDB per kapita tidak tersedia di tingkat provinsi. Produk nasional bruto riil yang disesuaikan digunakan oleh UNDP untuk mengukur standar hidup (daya beli). Karena PDRB per kapita tidak tersedia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka digunakan model belanja per kapita yang disesuaikan dengan menggunakan data SUSENAS. Metode baru ini menggunakan 96 komoditas, 66 di antaranya makanan dan 24 sisanya bukan makanan, untuk menentukan paritas daya beli. Batasan terendah dan maksimum digunakan dalam perhitungan (BPS, 2022).

4. Tujuan Indeks Pembangunan Manusia

Ada beberapa alasan mengapa menghitung IPM sebagai indikator pembangunan bermanfaat :

- a. Indikator akan dikembangkan untuk memperkirakan ukuran dasar pembangunan manusia, pembangunan manusia mendasar, dan perluasan pilihan.
- b. Menggunakan beberapa indikator untuk melindungi agar prosedur tetap normal.
- c. Indeks komposit dibentuk sebagai pengganti beberapa indeks dasar.
- d. Menciptakan ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

5. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia, atau HDI, adalah gabungan dari tiga ukuran terpisah yang bersama-sama mengungkapkan tingkat pembangunan suatu negara (Syahrani, 2018).

- a. Harapan hidup saat lahir (juga dikenal sebagai angka kematian bayi), yang mengukur lamanya hidup
- b. Jumlah orang yang melek huruf, tingkat pendidikan yang mereka peroleh, atau jumlah waktu yang mereka habiskan untuk belajar digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk
- c. Jumlah uang yang dihabiskan setiap tahun per orang digunakan untuk menentukan standar hidup

Sebuah metode baru yang dikembangkan oleh UNDP pada tahun 2010 mengalihkan penekanan pendekatan dari tingkat melek huruf ke jumlah siswa yang menyelesaikan sekolah menengah atas. Angka melek huruf diganti dengan angka harapan hidup karena di Indonesia sudah sangat tinggi (BPS, 2022).

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3(\text{Indeks } \chi_1) + (\text{Indeks } \chi_2) + (\text{Indeks } \chi_3) \dots (1)$$

Keterangan :

χ_1 = Indeks Harapan Hidup

χ_2 = Indeks Pendidikan

$\chi_3 = \text{Indeks Standar Hidup Layak}$

Usia rata-rata penduduk selama periode waktu tertentu diperkirakan dengan menggunakan harapan hidup. Harapan hidup penduduk di suatu negara atau wilayah meningkat secara proporsional dengan kualitas ekonomi dan sistem kesehatannya.

Rata-rata lama bersekolah dan perkiraan jumlah tahun bersekolah mengelompokkan dua indikator utama yang menyusun indeks pendidikan. Nilai indeks pendidikan meningkat seiring dengan peningkatan nilai kedua indikator tersebut. Sedangkan indeks daya beli menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki tingkat kehidupan yang cukup baik. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan menafkahi diri sendiri dan keluarga diukur dengan indikator ini.

Untuk masing-masing komponen ini, indeksnya terlebih dahulu dihitung sehingga nilainya bervariasi 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Indeks ini biasanya dikalikan dengan 100 untuk memudahkan analisis (Usmaliadanti, 2011). Untuk menghitung indeks setiap komponen IPM digunakan batasan maksimum dan minimum seperti tabel di bawah ini :

Table 6. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	20	Standar BPS
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	18	0	Standar BPS
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	Standar BPS
Daya Beli (Rupiah)	26.572.352	1.007.436	Standar BPS

Sumber: bps.go.id tahun 2016-2021

Untuk menghitung masing-masing komponen tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : (BPS, 2022)

$$\text{Dimensi Kesehatan: } I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan: } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(PengeluaranMin)}{\ln(PengeluaranMaks) - \ln(PengeluaranMin)}$$

Dimana:

I = Indeks

AHH = Angka Harapan Hidup

HLS = Harapan Lama Sekolah

RLS = Rata-rata Lama Sekolah

Setelah semua dihitung, Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{Kesehatan + Pendidikan + Pengeluaran} \times 100$$

Keterangan :

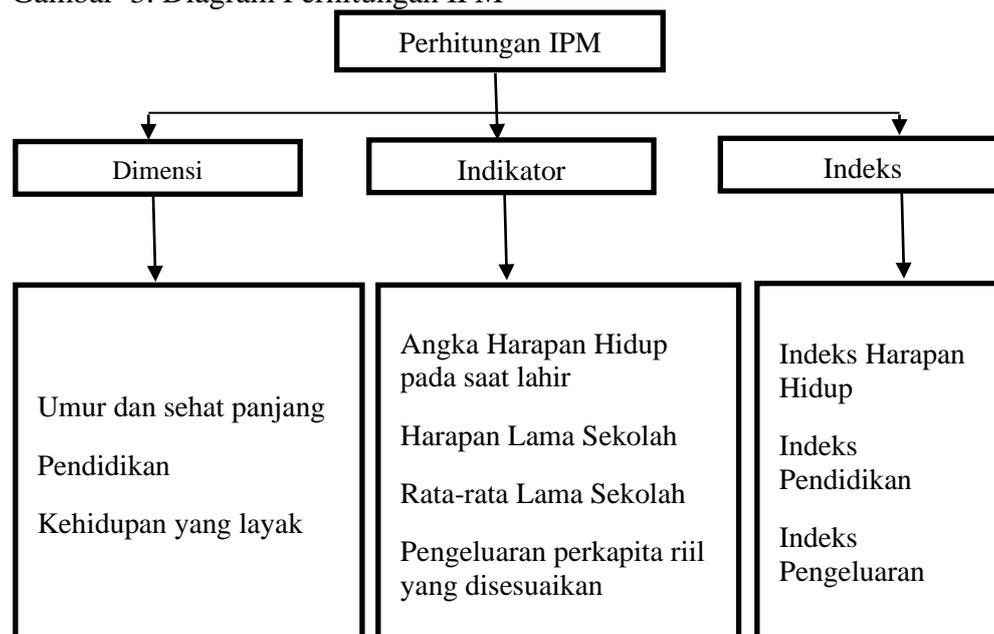
IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$I_{Kesehatan}$ = Indeks Kesehatan

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

$I_{pengeluaran}$ = Indeks Pengeluaran

Gambar 3. Diagram Perhitungan IPM



Sumber: bps.go.id

Setelah perhitungan selesai, hasilnya ditampilkan sebagai angka skor antara 0 dan 100. UNDP mengkategorikan empat tingkatan status pembangunan manusia daerah ke dalam kelompok-kelompok berikut : (BPS, 2022)

- a. Rendah: IPM di bawah 50
- b. Sedang atau menengah dibagi menjadi 2 kategori :
 - Kelas Menengah Bawah : $50 < IPM < 66$;
 - Kelas Menengah Atas : $66 < IPM < 80$;
- c. Tinggi: IPM di atas 80

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut World Bank, kemiskinan sebagai keadaan yang menyangkut kekurangan dengan pendapatan minimum US\$2.15 per hari. Ada tiga jenis kemiskinan. Jenis pertama adalah kemiskinan multidimensi. Meskipun kemiskinan itu kompleks dan beragam, ia memiliki banyak sisi. Kedua, ada semacam hubungan antara dimensi kemiskinan ini. Ketiga, baik secara individu maupun kolektif, orang miskin adalah manusia.

Di sisi lain, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan berarti tidak mempunyai cukup uang untuk membayar kebutuhan seperti makanan dan tempat tinggal. BPS mengikuti jejak Bank Dunia dalam mengadopsi metodologi belanja rumah tangga. Beberapa orang yang memiliki gaji rendah dan kurangnya kesempatan pendidikan tidak dianggap miskin berdasarkan penilaian kemiskinan resmi. Masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan meskipun ada upaya untuk memberantas kemiskinan dengan menggunakan strategi belanja (Ratih et al., 2022).

Memiliki pendapatan rendah hanyalah salah satu indikator kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu bentuk terburuk dari deprivasi manusia, tidak hanya terkait dengan berkurangnya kesejahteraan tetapi juga penolakan terhadap kesempatan hidup yang lebih baik (Sen & Anand, 1997). Sejalan dengan Sen dan Anand (1997), menurut Fauzi (2022), kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan perlu dilihat dari 2 sisi, yaitu moneter dan non-moneter. Dengan

pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kemiskinan dan bagaimana mengukurnya, para pembuat kebijakan dapat berupaya mencapai tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam upaya mereka untuk mengentaskan kemiskinan (Rahman & Muhammad Fathan Romdhoni, 2020).

Menurut Shirazi (1994), Pramanik (1993,1998) (dalam Beik & Arsyianti, 2015), mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman pada tingkat ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual.

Ada beberapa definisi mengenai kemiskinan :

- a. Pada tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan terjadi ketika individu atau masyarakat tidak mampu memanfaatkan peluang untuk mendapatkan upah layak dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- b. Ada empat jenis kemiskinan menurut Sumitro Djojohadikusumo (dalam Mafahir & Soelistiyo, 2017). Yang pertama adalah kemiskinan persisten, yang didefinisikan sebagai kemiskinan kronis atau menurun. Yang kedua adalah kemiskinan siklis, yang mengikuti struktur sistem ekonomi secara umum. Ketiga adalah petani dan nelayan sangat rentan terhadap kemiskinan musiman. Keempat, bencana alam yang menyebabkan penurunan taraf hidup merupakan jenis kemiskinan yang tidak disengaja.
- c. Todaro (dalam Michael & Stephen, 2006), mengklaim bahwa ambang batas kemiskinan tidak diperlukan untuk menghitung tingkat kemiskinan relatif. Meskipun garis kemiskinan digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif merupakan pengertian yang berbeda. Ketika suatu masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup, mereka dikatakan hidup dalam kemiskinan absolut. Orang-orang ini berpenghasilan kurang dari “garis kemiskinan internasional”, yang menyebabkan perbedaan harga global dan lokal. Dalam kaitannya dengan paritas daya beli (PPP) dolar, masyarakat dianggap miskin jika mereka berpenghasilan kurang dari \$1 atau \$2 per hari. Meskipun merupakan indikator statistik kesenjangan ekonomi, kemiskinan relatif sering kali didefinisikan dalam median pendapatan.

- d. Menurut Al-ghazali (dalam Nurul, 2015) mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang.

Kemiskinan merupakan hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan karena tidak hanya diukur melalui kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Kesehatan, pendidikan, dan praktik-praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan adalah bagian dari hal ini (Dewi, 2017 ; Ayu & Husaini, 2013).

2. Teori Kemiskinan

Paradigma neoliberal dan paradigma sosial demokrat adalah dua paradigma atau ideologi besar yang diklaim oleh Suharto (dalam Astuti, 2015) untuk memahami kemiskinan.

a. Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan adalah masalah yang mempengaruhi satu orang saja dan bukan akibat dari kesalahan atau keputusan kolektif. Kekuatan pasar harus ditingkatkan semaksimal mungkin, bersama dengan ekspansi ekonomi, untuk menghilangkan kemiskinan. Kemiskinan harus dihilangkan secara permanen, hal itu tidak bisa hanya merugikan individu, keluarga, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga keagamaan.

b. Teori Paradigma Sosial Demokrasi

Gagasan sosial demokrasi tentang kemiskinan adalah masalah struktural daripada masalah itu sendiri. Karena terbatasnya akses kelompok tertentu ke berbagai sumber daya sosial, kemiskinan dihasilkan dari ketidakadilan sosial dan kesenjangan keuangan dalam masyarakat. Kelompok sosial-demokrat berpendapat bahwa mencapai kesetaraan adalah prasyarat untuk mencapai kebebasan dan kesetaraan.

3. Indikator Kemiskinan

Foster et al., 1984, mengembangkan tiga ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemiskinan :

- a. Angka kemiskinan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang tinggal di rumah tangga yang pendapatan per orang tahunannya kurang dari ambang batas kemiskinan.

- b. Indeks Kesenjangan Kemiskinan (IJK) adalah ukuran tingkat kemiskinan di suatu daerah. Indikator ini menghitung jarak antara garis kemiskinan dan pendapatan rata-rata penduduk miskin sebagai persentase dari garis tersebut.
- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) menghitung seberapa parah kemiskinan itu. IJK dan indeks ini pada dasarnya setara. CCI tidak hanya mengukur kesenjangan antara orang miskin dan garis kemiskinan, tetapi juga ketimpangan di antara orang miskin atau berapa banyak uang yang dihabiskan untuk siapa. Tingkat kemiskinan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran ini, juga disebut sebagai indeks sensitif distribusi.

4. Macam-macam Kemiskinan

Menurut Nur, (2010), Arsyad, (2006), ada tiga kategori macam kemiskinan, yaitu:

- a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan, yang didasarkan pada standar hidup minimum suatu negara karena standar minimum berbeda-beda di setiap negara.

- b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah rasio pendapatan seseorang terhadap median nasional. Dengan kata lain, permasalahan distribusi pendapatan berkontribusi terhadap kemiskinan relatif. Menurut teori ini, ambang kemiskinan bergeser ketika median pendapatan sekelompok individu tertentu naik atau turun.

- c. Kemiskinan Struktural

Istilah “kemiskinan struktural” mengacu pada kerentanan ekstrim dan eksploitasi suatu populasi di tangan pemerintah.

5. Penyebab Kemiskinan

Salah satu penyebab kemiskinan, menurut World Bank (dalam Chalid & Yusuf, 2014) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan termasuk sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang baik. Masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin seringkali memiliki tingkat pekerjaan yang rendah serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai. Menurut Bappeda, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tantangan

dalam menemukan sumber daya untuk pendidikan dan pekerjaan dapat berkontribusi pada kemiskinan.

Kuncoro dan Safi'i (dalam Usmaliadanti, 2011), faktor sosial dan ekonomi dapat digunakan untuk mengevaluasi penyebab kemiskinan karena adanya hubungan antara kedua faktor tersebut. Adapun penyebabnya yaitu :

- a. Lapangan kerja yang terbatas. Rasio penduduk yang bekerja terhadap seluruh angkatan kerja dikenal sebagai tingkat kesempatan kerja.
- b. Memiliki akses publik yang terbatas ke faktor-faktor produksi berarti :
 - 1) Terbatasnya akses keuangan untuk startup
 - 2) Akses pasar masyarakat yang buruk
 - 3) Rendahnya kepemilikan asset

Dari sudut pandang ekonomi, Kemiskinan mempengaruhi baik akses sosial maupun sisi ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- a. Rendahnya ketersediaan pendidikan. Orang-orang di negara berkembang biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang menurunkan produktivitas dan pendapatan mereka.
- b. Rendahnya ketersediaan fasilitas kesehatan. Layanan kesehatan jauh lebih sulit diakses dan maju di negara-negara terbelakang.

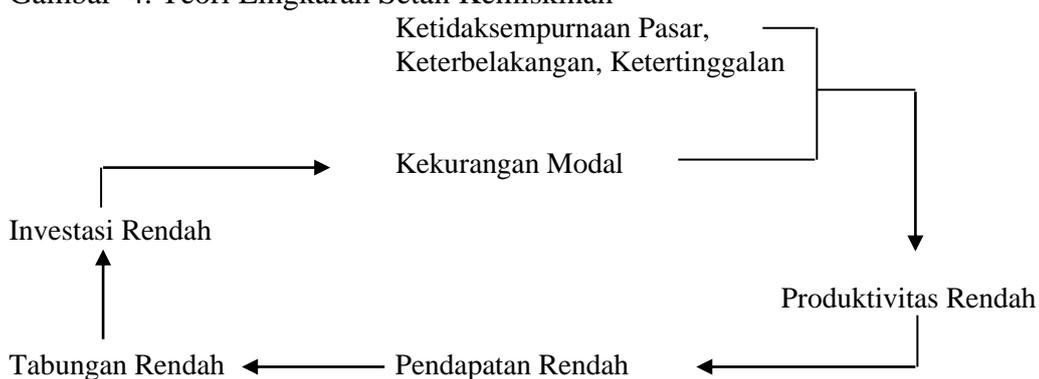
Menurut Sharp (dalam Kuncoro, 1997), dari segi ekonomi, penyebab kemiskinan ada beberapa hal, antara lain :

- a. Secara mikro, ketimpangan kepemilikan sumber daya menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan, yang merupakan akar penyebab kemiskinan.
- b. Perbedaan kualitas sumber daya manusia merupakan akar penyebab kemiskinan. Kurangnya kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab utama rendahnya produktivitas dan rendahnya upah. Alasan utama buruknya kualitas sumber daya manusia mencakup rendahnya tingkat pendidikan, kondisi buruk, diskriminasi, atau karakteristik keturunan.
- c. Perbedaan akses modal menjadi faktor utama pada kemiskinan.

Menurut Nurkse (1953), menyatakan bahwa hipotesis lingkaran setan kemiskinan di mana keterbelakangan, disfungsi pasar, dan kurangnya modal menghasilkan output yang rendah. Produksi yang rendah menghasilkan pendapatan yang sedikit. Pendapatan yang rendah berdampak pada sedikitnya investasi dan tabungan. Keterbelakangan adalah hasil dari investasi kecil, dan lain-lain.

Konspirasi Kejahatan Menurut "Teori Kemiskinan", sebuah negara miskin berada dalam situasi saat ini karena adanya faktor-faktor yang membuat negara tersebut tetap bertahan. Siklus kemiskinan seseorang bisa terlihat seperti ini: dia miskin sehingga selalu kekurangan makanan; akibatnya, kesehatan mereka memburuk dan fisik mereka menjadi lemah; akibatnya kemampuan mereka memperoleh uang menurun; akibatnya pendapatan mereka menurun; dan seterusnya (Yu & Huang, 2021).

Gambar 4. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber: Kuncoro, 1997

Menurut Ginanjar Karasasmita (dalam S. Arifin, 2017), mengatakan bahwa penyebab utama kemiskinan ada empat, yaitu :

- a. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan terbatasnya pilihan pekerjaan dan terbatasnya keterampilan pengembangan diri. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah membatasi peluang dan penggunaannya.
- b. Kekebalan fisik, kekuatan mental, dan inisiatif semuanya dipengaruhi secara negatif oleh kesehatan dan gizi yang buruk.

- c. Prospek kerja terbatas karena mempersulit upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan. Siklus kemiskinan masih bisa diputus selama masih ada lapangan pekerjaan.
- d. Beberapa orang miskin tinggal di negara-negara terpencil yang tidak berdaya secara ekonomi karena keterasingan mereka. Mereka tinggal di tempat-tempat terpencil, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pelayanan pembangunan, kesehatan, dan pendidikan yang dianggap biasa oleh masyarakat lain.

6. Kesejahteraan Masyarakat

Kata Sanskerta "*catera*" yang berarti payung memiliki arti yang sama dengan kata "makmur" dalam bahasa Inggris. Dalam konteks kesejahteraan, "*catera*" adalah orang yang mempunyai kekayaan materi dan karenanya dapat menikmati keamanan mental dan fisik serta bebas dari kemiskinan (Fahrudin, 2012).

Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur tingkat kesejahteraan :

- a. Pendapatan rumah tangga
- b. Konsumsi rumah tangga
- c. Situasi tempat tinggal
- d. Kesejahteraan anggota keluarga
- e. Akses layanan kesehatan sederhana
- f. Pakaian untuk rumah tangga

Kita dapat menyimpulkan pentingnya pendapatan keluarga dengan menggunakan metrik ini. Ketika pendapatan keluarga meningkat, pengeluaran juga meningkat, dan seterusnya, hingga biaya kuliah terbayar.

C. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Sesuai dengan namanya, belanja publik mengacu pada uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program dan layanan bagi masyarakat umum. Peraturan Pemerintah RI nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Menyelenggarakan produk, jasa, dan/atau pelayanan

administratif kepada seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pengertian pelayanan publik. Pemerintah Indonesia menawarkan pelayanan barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administrasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah.

Menurut Soediyono, (1992) Pengeluaran yang mendapat kompensasi satu banding satu dari pemerintah dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah, atau sekadar pengeluaran pemerintah. Seperti yang bisa kita lihat, tujuan pengeluaran pemerintah adalah untuk mendukung konsumsi pemerintah, aktivitas, dan pengeluaran lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan umum penduduk.

Investasi pemerintah yang sangat mendasar dalam kemajuan masyarakat adalah dana pendidikan. Pendidikan membantu pematangan potensi manusia, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat sehari-hari. Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan kapasitas suatu negara untuk mengadopsi teknologi baru, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pendidikan juga memiliki dampak yang signifikan dalam membangun kapasitas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Sektor pendidikan memegang peranan penting dalam memfasilitasi proses industri dan kegiatan ekonomi lainnya menuju tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tujuan pembangunan berkelanjutan bergantung pada kegiatan pembangunan yang dapat dicapai melalui pendidikan dan mengarah pada peningkatan peluang masa depan untuk meningkatkan kondisi kehidupan. Hal tersebut, menggabungkan investasi pendidikan ke dalam strategi modal manusia (Syahrani, 2018).

Pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran APBN atau 20 persen dari APBD, untuk sektor pendidikan, yang meliputi pembiayaan pendidikan di luar gaji dan biaya pendidikan dinas sebagai mana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003. Hal ini berusaha untuk meningkatkan standar sumber daya manusia untuk memastikan mereka dapat mengikuti perkembangan zaman,

karena kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat pendidikan warga negaranya (Palenewen, 2018).

Pemerintah Indonesia memprioritaskan reformasi pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan pasokan pekerja terampil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Investasi sumber daya manusia, seperti pendanaan untuk sekolah, dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang bagi masyarakat mana pun (Wahyudi, 2020). Setiap tahun, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan meningkat. Alokasi anggaran dipusatkan pada peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, termasuk peningkatan tenaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu aspek yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara adalah kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penyediaan sistem pendidikan formal merupakan barang sosial yang harus disediakan oleh negara. Selain memperoleh fakta dan angka, suatu negara juga bisa mendapatkan manfaat dari penanaman standar, nilai luhur, dan cita-cita. Ada banyak manfaat berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, termasuk pengembangan angkatan kerja yang lebih efisien sebagai akibat dari peningkatan kemampuan melek huruf dan berhitung, perluasan kesempatan kerja, penyediaan sekelompok manajer yang berkualitas untuk mengisi posisi terbuka di suatu organisasi, dan promosi nilai-nilai progresif (Todaro & Smith, 2003).

Pendidikan memberikan landasan untuk meningkatkan angkatan kerja. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan tujuan pendidikan adalah untuk membekali peserta didik dengan lingkungan dan cara-cara yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, produktif, dan memiliki karakter yang dihargai oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut World Bank, berikut ini implikasi pendidikan sebagai faktor yang mencakup seluruh aspek kemajuan. Untuk memulainya, harus ada beragam topik dan pendekatan yang diajarkan di sekolah. Aspek kedua adalah mengeluarkan uang untuk bidang lain sehingga siswa dapat berpartisipasi dalam pembangunan

ekonomi melalui pekerjaan produktif. Terakhir, pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan persamaan hak dan keadilan di kelas berjalan beriringan. Misalnya, memperluas akses terhadap pendidikan di daerah pedesaan dapat meningkatkan keadilan sosial sekaligus mempercepat penyebaran praktik yang lebih efisien di berbagai bidang seperti pertanian, industri, dan keuangan. Dalam situasi ini, pendidikan dipandang sebagai alat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang karena membuka jalan bagi terciptanya peluang baru yang akan membantu generasi mendatang memperoleh keterampilan hidup yang lebih diinginkan

2. Teori Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan

Menurut Mangkoesoebroto (dalam Winarti, 2014), Teori makro dan mikro dapat digunakan untuk mempelajari pengeluaran publik. Besar kecilnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh belanja pemerintah dapat diukur dengan melihat nilai belanja pemerintah yang sebenarnya. Semakin besar dan seringnya tindakan pemerintah dilakukan, semakin banyak dana yang akan dibelanjakan untuk tindakan tersebut.

- a. Secara Mikroekonomi, tujuan dari teori permintaan barang publik adalah untuk menguji faktor-faktor penentu permintaan barang publik dan variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran barang publik. Kuantitas barang publik yang dianggarkan ditentukan oleh dinamika antara permintaan dan penawaran barang publik. Pengeluaran barang publik yang dilakukan pemerintah akan menyebabkan peningkatan pengeluaran barang swasta.
- b. Secara Makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989), tujuannya adalah untuk mengkaji ukuran pemerintahan agar lebih memahami transaksi anggaran, perusahaan publik, dan kebijakan publik. Ekspansi perekonomian mempunyai dampak positif terhadap pengeluaran sektor publik. Semakin banyak uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berarti semakin banyak layanan yang disediakan oleh sektor publik.

Mengenai pengeluaran pemerintah dibagi menjadi beberapa, yaitu :

- a. Teori Rostow dan Musgrave

Ketika perekonomian masih muda, pemerintah membelanjakan PDB dalam jumlah yang relatif kecil untuk infrastruktur dan fasilitas seperti sekolah dan rumah sakit. Namun, seiring dengan semakin matangnya perekonomian, porsi ini akan tumbuh jauh lebih besar. Karena banyaknya kegagalan pasar yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi itu sendiri, bantuan pemerintah masih diperlukan pada tahap kedua untuk mendorong pertumbuhan dan memungkinkannya lepas landas.

b. Teori Wagner

Pengeluaran pemerintah ditentukan oleh pendapatan per kapita, oleh karena itu ketika pendapatan per kapita naik, itu juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Masalah kelemahan hukum ini adalah bahwa pemerintah dipandang sebagai orang dengan bebas berkehendak daripada didasarkan pada teori barang publik.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah didasarkan pada upaya untuk mengumpulkan uang dan membayar lebih banyak pajak atas penggunaan berbagai fasilitas oleh masyarakat.

3. Peran dan Fungsi Pemerintah

Menurut Dumairy 1999 (dalam Lita Nia, 2021), pemerintah memiliki 4 peran yaitu :

- a. Peran Alokasi, peran yang dimainkan oleh negara dalam perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya untuk efektivitas dan efisiensi maksimum dalam output.
- b. Peran Distribusi, yang saya maksud adalah tugas pemerintah untuk memastikan distribusi kekayaan nasional dan peluang ekonomi yang adil dan merata
- c. Peran Stabilisasi, tanggung jawab pemerintah untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi dan memperbaiki ketidakseimbangan yang mungkin timbul.
- d. Peran Dinamisasi, khususnya, peran pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan, pembangunan, dan kemajuan ekonomi.

4. Macam-Macam Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko, 1994 :

- a. Pengeluaran Belanja Rutin
Pemeliharaan atau pengelolaan sehari-hari pemerintah merupakan pengeluaran rutin. Biaya personel, barang, pemeliharaan, dan perjalanan termasuk dalam kategori pengeluaran rutin.
- b. Pengeluaran belanja pembangunan
Investasi pemerintah, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut kedalam kategori belanja pembangunan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sadono Sukirno (dalam Ilyas, 1989), Pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial berikut ini semuanya mempunyai peran dalam menentukan besarnya belanja pemerintah :

- a. Faktor bersifat ekonomi, Secara khusus, hal ini berkaitan dengan upaya memaksimalkan penggunaan energi tanpa menaikkan harga untuk memacu ekspansi ekonomi yang cepat.
- b. Faktor bersifat politik dan sosial, yaitu membutuhkan pengeluaran finansial yang besar, lebih spesifiknya. Hal tersebut antara lain menjamin keselamatan masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, menjaga perdamaian, dan lain sebagainya.

D. Hubungan Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

1. Hubungan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mahmudi (dalam S. Arifin, 2017) lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama penyebab kemiskinan, yaitu:

- a) Rendahnya tingkat kesehatan
- b) Rendahnya pendapatan
- c) Rendahnya tingkat pendidikan

Hubungan ini merupakan bagian dari indikator IPM yang berhubungan satu sama lain dari kesehatan sampai pendidikan.

Memiliki kesehatan yang buruk juga mempengaruhi produktivitas. Kemiskinan diakibatkan oleh produktivitas yang rendah, yang juga menghasilkan pendapatan yang rendah. Selain itu, kemiskinan menghalangi seseorang untuk melanjutkan pendidikan dan mempersulit mereka untuk membayar biaya hidup dan kesehatan (Winarti, 2014).

Kemiskinan dapat dipengaruhi melalui peningkatan IPM dan peningkatan kesehatan dan pendidikan. Kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan investasi pemerintah dalam industri kesehatan, dan anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pendidikan terbaik. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki akses ke pengetahuan dan keterampilan yang mendorong output dan menaikkan pendapatan.

Tujuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk setempat adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan sosial (termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan makanan). Berinvestasi pada sumber daya manusia berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas daerah berpenghasilan rendah dan memperluas akses terhadap layanan penting (Lestari, 2017).

2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Karena terbukti penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara, memberikan akses yang sama kepada semua warga negara terhadap pendidikan berkualitas tinggi telah menjadi tujuan utama strategi pembangunan (Winarti, 2014). Kinerja tenaga kerja manusia selama proses pembangunan, juga dikenal sebagai modal manusia investasi, adalah dasar dari teori pertumbuhan ekonomi yang sedang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa landasan terbaik untuk melaksanakan pembangunan di daerah adalah peningkatan kapasitas masyarakat (Syam, 2014).

Tujuan pembangunan adalah sekolah. Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk kapasitas suatu negara untuk mengadopsi teknologi mutakhir dan memperoleh keahlian yang penting untuk mencapai keberhasilan ekonomi

jangka panjang. Sebagai masukan penting bagi fungsi produksi agregat, pendidikan juga merupakan faktor kunci dalam pembangunan dan perluasan ekonomi. Karena nilainya sebagai input dan produk, pendidikan sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Para ekonom melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia suatu negara, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang memperolehnya tetapi juga negara secara keseluruhan. Sebagai bentuk investasi pada sumber daya manusia, belanja pendidikan dapat dipecah menjadi dua kelompok berbeda: belanja swasta dan belanja pemerintah (Winarti, 2014).

Investasi swasta adalah investasi pribadi skala kecil dalam pendidikan. Individu dengan pendidikan formal maupun informal, terutama orang tua yang menyekolahkan anaknya di bidang tertentu, merupakan salah satu bentuk investasi swasta. Sebaliknya, Investasi publik mengacu pada pengeluaran masyarakat dan pemerintah yang dilakukan untuk tujuan pendidikan, seperti penyediaan ruang kelas, perpustakaan, buku pelajaran, pendanaan, dan fasilitas fisik (Arifin, 2015).

Karena pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan dana untuk pendidikan, pemerintah harus mempunyai sumber daya untuk membangun dan memelihara infrastruktur pendidikan yang baik. Berinvestasi di sektor pembangunan di Indonesia memungkinkan akses universal terhadap layanan kesehatan, transportasi, dan peluang pendidikan. Fakta bahwa pemerintah mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan menunjukkan bahwa pemerintah memandang serius pendidikan (Wahid, 2012 ; Resha & Gunarto, 2015).

Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat secara keseluruhan, semakin mudah teknologi baru diadopsi dan digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup seluruh warga negara. Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan harus meningkat jika suatu negara ingin maju (Winarti, 2014 ; Aida et al., 2021).

E. Penelitian Terdahulu

Table 7. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Astri Winarti (2014)	Analisis Pengaruh pemerintah bidang Pendidikan, kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode 1992-2012	Regresi linear berganda dan <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan, Kemiskinan, PDRB, IPM	Hasil penelitian menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia. Sedangkan variabel anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Indonesia.
2.	Rayhan Arya Wicaksono (2020)	Kemiskinan dan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Regresi Linier Berganda dan <i>Ordinary Least Square</i>	Kemiskinan, Pendidikan, IPM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Angka Partipasi Murni terhadap IPM signifikan. Secara parsial variabel Angka Partipasi Murni berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Indonesia. Indeks Kedalaman Kemiskinan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IPM

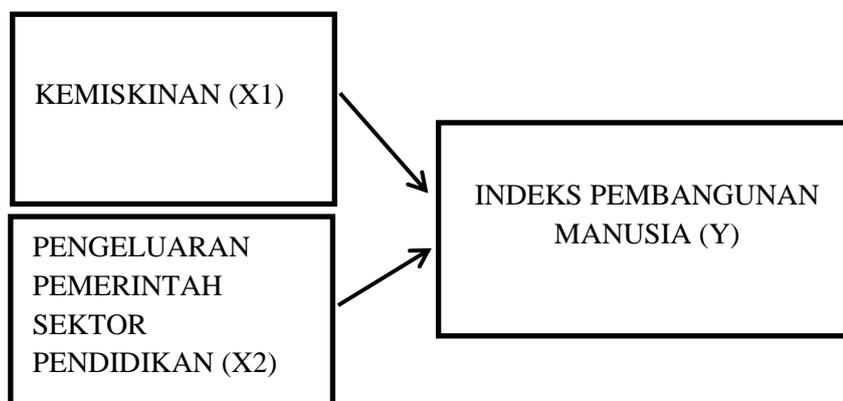
No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Anisa Syahrani (2018)	Analisis pengaruh kemiskinan, Kesehatan, dan Pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di kabupaten Pesawaran Tahun 2014-2016)	Regresi Linier Berganda	Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, IPM	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh dan tidak signifikan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia. Adanya pengaruh dan signifikan kesehatan terhadap IPM tidak ada pengaruh dan tidak signifikan pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
4.	Riana Puji Lestari (2017)	Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia,	<i>Fixed Effect Metode</i>	IPM, Pengangguran, PDRB, Tingkat Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan IPM berpengaruh secara negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Prov. Lampung. Pengangguran berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kemiskinan di Prov. Lampung
5.	Syamsul Arifin (2017)	Analisis pengaruh garis kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM Lampung di tinjau dari perspektif Ekonomi Islam	Regresi Linier Berganda	Garis Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, IPM	Artikel ini menemukan bahwa kinerja kelembagaan yang lemah, korupsi yang tinggi, sebagian perekonomian informal, dan sektor energi tidak efisien menyebabkan meningkatnya pertumbuhan negara

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
6.	Mochammad Yuli Arifin, Petrus Edy Suswandi, Moh. Adenan (2015)	Pengaruh pengeluaran pemerintah sector Kesehatan, pengeluaran pemerintah sector Pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013	<i>Fixed Effect Method</i>	Pengeluaran pemerintah sector Kesehatan, pengeluaran pemerintah sector Pendidikan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia	Hasil penelitian menunjukkan Pengeluaran pemerintah sector kesehatan (PPS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur Tahun 2006-2013. Pengeluaran pemerintah sector pendidikan (PPD) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur tahun 2006-2013. Pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap IPM di Jawa Timur
7.	Arisman (2018)	Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries	<i>Fixed Effect Method</i>	Jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita, IPM	jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya IPM pada negara anggota ASEAN. Sedangkan variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memengaruhi IPM

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variabel	Hasil Penelitian
8.	Denni Sulistio Mirza (2012)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM di Jawa Tengah Tahun 2006-2009	<i>Fixed Effect Method</i>	Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia	Hasil Penelitian menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

F. Kerangka Pemikiran

Gambar 5. Kerangka Pemikiran



HDI memberikan wawasan tentang ketersediaan hasil pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Karena upaya suatu negara untuk meningkatkan pembangunan manusia di bidang-bidang seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan sama pentingnya dengan upaya untuk meningkatkan produk domestik bruto, maka indeks pembangunan dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan tersebut (BPS, 2022).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk wilayah Indonesia Bagian Barat terutama pada Pulau Sumatera termasuk

kategori rendah jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Pulau Sumatera itu lebih besar daripada Pulau Jawa seharusnya IPM nya lebih bagus, namun kenyataannya menunjukkan hal yang bertolak belakang. Pulau Sumatera malah lebih rendah Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan Pulau Jawa. Lalu, jika Sumatera dibagi menjadi beberapa daerah lagi yaitu terdapat Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Bagian Utara. Ternyata Sumatera Bagian Selatan lebih rendah Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan dengan Sumatera Bagian Utara.

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia meningkat di Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung; kelima wilayah ini membentuk Sumatera Bagian Selatan. Namun, indikator-indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia yaitu pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kemiskinan telah dipengaruhi untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Pembangunan manusia tidak dapat diklaim mengalami kemajuan jika diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk lebih memahami hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kemiskinan serta HDI, kerangka konseptual dikembangkan dalam penelitian ini. Selain itu, kami akan melakukan serangkaian pengujian terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan analisis variabel independen secara parsial dan simultan.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang kebenarannya masih dipertanyakan sehingga memerlukan verifikasi. Teori berikut dikemukakan dalam penelitian ini :

1. Diduga terdapat pengaruh negatif antara variabel kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Diduga terdapat pengaruh positif antara variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Diduga kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, yang terdiri dari Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Table 8. Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Persen	Badan Pusat Statistik
Kemiskinan	KMS	Persen	Badan Pusat Statistik
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	PDK	Milyar Rupiah	DJKP Kemenkeu

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang menurut para ilmuwan harus ada agar penelitian mereka dapat dilakukan. Variabel penelitian pada prinsipnya adalah ciri-ciri orang atau benda yang berubah dari satu kejadian ke kejadian lainnya. (Sangadji, 2010), adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel Terikat (*dependent variabel*)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran statistik mengenai seberapa jauh kemajuan suatu negara menuju kualitas hidup yang lebih baik. Situs web Badan Pusat Statistik berfungsi sebagai sumber data, dan persentase harapan hidup, lama sekolah yang diharapkan, dan rata-rata lama sekolah untuk tahun 2016-2021 dihitung menggunakan informasi yang tersedia.

2. Variabel Bebas (*independent variabel*)

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan.

a. Kemiskinan (X1)

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Pada variabel ini menggunakan persentase penduduk miskin yang didapatkan dari *website* BPS Indonesia tahun 2016-2021. Menurut BPS persentase penduduk miskin didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{Z} \right]$$

Keterangan :

α = 0

z = garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

b. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Variabel pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan merupakan data yang menunjukkan realisasi APBD sektor pendidikan masing-masing Provinsi Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang didapatkan melalui *website* DJPK Kemenkeu selama periode tahun 2016-2021 dengan satuan milyar rupiah.

C. Wilayah Penelitian

Wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) meliputi Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung selama periode 2016-2021.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan *Purposive sampling* yaitu dipilih berdasarkan kriteria

tertentu. Dengan kriteria sampel yang dipilih adalah data persentase kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan tingkat indeks pembangunan manusia. Menggunakan sampel sebanyak lima provinsi di Sumatera Bagian Selatan, tahun 2016-2021, dan observasi sejumlah 30. Data yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik dan *website* DJPK Kementerian Keuangan digunakan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Persamaan regresi data panel digunakan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di lima provinsi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Indeks pembangunan manusia merupakan variabel terikat, sedangkan kemiskinan dan belanja pendidikan masyarakat merupakan faktor independent :

$$Y_{1it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Selanjutnya fungsi tersebut dispesifikasikan ke dalam model sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 KMS_{it} + \beta_2 PDK_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
KMS	= Kemiskinan
PDK	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$	= Koefisien regresi variabel independen
e	= Error term
i	= Provinsi
t	= Waktu

Indeks pembangunan manusia dan indeks kemiskinan dinyatakan dalam persentase, sedangkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan diukur dalam miliaran rupiah. Oleh karena itu, model semi-Log digunakan untuk penelitian ini.

Menurut (Nachrowi & Usman, 2018 ; D. N. Gujarati, 2003), semi-Log adalah keluaran transformasi logaritmik suatu model yang tidak linier. Hanya variabel dependen atau independen yang mengalami transformasi dalam model semi-Log.

Model semi-Log, yang didasarkan pada konsep transformasi semi-Log, dapat dibagi menjadi dua kategori :

1. Model Log-Lin, Dengan demikian, model dihasilkan sebagai hasil transformasi logaritmik dari variabel terikat dan tidak ada transformasi atau pemeliharaan bentuk linier untuk variabel bebas.
2. Model Lin-Log, yaitu Dengan demikian, model dibangun dengan melakukan logaritma variabel independen sambil mempertahankan variabel dependen dalam bentuk linier aslinya.

Sehingga model dalam penelitian ini disebut sebagai model Lin-Log, dengan model penelitian sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 KMS_{it} + \beta_2 LNPDK_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
KMS	= Kemiskinan
PDK	= Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
β_0	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$	= Koefisien regresi variabel independen
e	= Error term
it	= Waktu (2016-2021)

Peneliti menggunakan lima provinsi, maka model akan digunakan model data panel dengan bantuan program *Eviews 10*. Dalam praktiknya model data panel terdiri dari model FEM dan REM.

1. FEM (Fixed Effect Model)

FEM merupakan model estimasi data yang menggabungkan regresi panel dengan variabel dummy. Karena dalam model ini diharapkan dampak regional (*cross section*) bervariasi, maka *cross section* diperkirakan sebagai parameter bebas melalui penggunaan variabel *dummy*. Asumsi intersep dan kemiringan yang konstan menghadirkan tantangan ketika menggunakan teknik efek tetap dengan data panel. Untuk menyalahi hal ini, panel data memiliki variabel *dummy* untuk memperhitungkan variasi nilai parameter unit dan waktu tertentu (deret waktu). Model efek tetap, atau *Least Square Dummy Variable*

(LSDV), adalah sejenis metode statistik yang menggunakan variabel *dummy* (N. D. Gujarati & Porter, 2013).

$$IPM_{it} = \beta_0_{it} + KMS_{it} + LNPDK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

IPMit : Indeks Pembangunan Manusia

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

KMSit : Kemiskinan

LNPDKit : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

It : Waktu (2016-2021)

E : Error term

Terdapat dua asumsi pada model estimasi ini, yaitu :

- a. Dengan asumsi intersep dan slope bervariasi antar unit. Variabel *dummy* digunakan untuk menjelaskan variasi intersep yang dihasilkan oleh jenis regresi ini, karena nilainya tidak tetap dan dapat bervariasi untuk setiap titik data. Model estimasi *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) dapat digunakan untuk melakukan regresi pada strategi ini.
- b. Dengan asumsi koefisien intersep bervariasi dan slope memiliki nilai konstan.

2. REM (Random Effect Model)

REM adalah sejenis regresi panel yang mengasumsikan bahwa istilah kesalahan (variabel gangguan) berhubungan dengan orang dan waktu. Masalah efisiensi parameter dapat dikurangi melalui penggunaan variabel pengganggu atau pendekatan model efek acak. Dalam model ini, variabel gangguan pada masing-masing perusahaan memperhitungkan terjadinya intersep yang berbeda-beda (N. D. Gujarati & Porter, 2013).

Keunggulan model ini adalah dapat menghilangkan heteroskedastisitas yang terjadi. Metode ini dapat diregresi menggunakan model *Generalized Least Square* (GLS) atau *Error Component Model* (ECM).

Persamaan matematis *random effect model* dapat ditulis dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$IPM_{it} = \beta_0_{it} + KMS_{it} + LNPDK_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

IPMit : Indeks Pembangunan Manusia

β_1, β_2 : Koefisien Regresi

KMSit : Kemiskinan

LNPDKit : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

It : Waktu (2016-2021)

E : Error term

3. Prosedur Metode FEM dan REM

Ekperimen berbeda dilakukan untuk mengevaluasi apakah FEM atau REM adalah model yang lebih unggul.

Menurut (Widarjono, 2009) :

a. Uji *Chow Test*

Uji *Chow Test* digunakan untuk menentukan apakah *model common effect* atau *fixed effect model* merupakan pilihan yang lebih unggul. Hipotesis Uji *Chow* memerlukan langkah-langkah berikut :

- 1) H_0 : Memilih dan menggunakan Metode Common Effect
 H_a : Memilih dan menggunakan Metode Fixed Effect
- 2) *Tingkat* signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- 3) *Statistik uji* : P-value
- 4) *Daerah kritis* : H_0 ditolak jika P-value < Critical Value ($\alpha = 5\%$)
- 5) *Kesimpulan*: H_0 diterima karena P-value > Critical Value ($\alpha = 5\%$)

b. Uji *Hausman Test*

Anda dapat membandingkan keunggulan model efek tetap dengan model efek acak dengan bantuan Uji *Hausman*. Hasil Uji *Chow* yang mendukung dan menggunakan model efek tetap akan menampilkan komponen seperti variabel *dummy* dan penghapusan derajat kebebasan. Namun, pendekatan model efek acak memerlukan perhatian yang cermat terhadap asumsi masing-masing komponen dan verifikasi bahwa tidak ada pelanggaran terhadap asumsi tersebut. Perumusan Hipotesis dalam Uji *Hausman*.

- 1) H_0 : Memilih dan menggunakan Metode Random Effect
 H_a : Memilih dan menggunakan Metode Fixed Effect

- 2) *Tingkat* signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- 3) *Statistik* uji : P-value
- 4) *Daerah* kritis : H_0 ditolak jika P-value < Critical Value ($\alpha = 5\%$)
- 5) *Kesimpulan*: H_0 diterima karena P-value > Critical Value ($\alpha = 5\%$)

c. Uji *Langrange Multiplier*

Untuk membandingkan *model fixed-effect* regresi data panel dengan *model common-effect* digunakan uji *Langrange Multiplier*. Hipotesis Uji Pengali *Langrange* dirumuskan sebagai berikut :

- 1) H_0 : Memilih dan menggunakan Metode Common Effect
 H_a : Memilih dan menggunakan Metode Random Effect
- 2) *Tingkat* signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
- 3) *Statistik* uji : chi-square
- 4) *Daerah* kritis : H_0 ditolak jika chi-square < Critical Value ($\alpha = 5\%$)
- 5) *Kesimpulan*: H_0 diterima karena chi-square > Critical Value ($\alpha = 5\%$)

4. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah temuan penelitian pada persamaan regresi melanggar salah satu asumsi klasik.. Menurut Gujarati & Porter, (2013) :

a. Uji Normalitas

Tujuan Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel residu atau perancu dalam suatu model regresi mengikuti distribusi normal. Jika asumsi sampel kecil dilanggar, maka uji t dan F mengharapkan nilai residu berdistribusi normal. Nilai *Probability* dan *JB Probability* digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal. Data dianggap terdistribusi teratur jika statistik *Jarque-Bera* lebih besar dari 0,05.

H_0 : *Residual* berdistribusi normal (Probabilitas dan *Jarque-Bera* > 0,05)

H_a : *Residual* tidak berdistribusi normal (Probabilitas dan *Jarque-Bera* < 0,05)

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai jumlah variasi yang sama, dapat dilakukan Uji Heteroskedastisitas. Dalam regresi linier, adanya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan memeriksa nilai Prob. Hitungan F-statistik. Regresi linier dianggap homoskedastis jika dan hanya jika Prob. F yang dihitung lebih besar dari 0,05.

H_0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas (Probabilitas F-statistik > 0,05)

H_a : Terjadi heteroskedastisitas (Probabilitas F-statistik < 0,05)

c. Uji Autokorelasi

Tujuan Uji Autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah error sisa model regresi linier berkorelasi dengan error pada periode t-1 (sebelumnya). Adanya korelasi disebut sebagai masalah autokorelasi. Ketergantungan waktu antar pengamatan yang berurutan menimbulkan autokorelasi. Masalah ini terjadi karena residu (kesalahan noise) tidak terdistribusi secara acak di antara observasi. Kelembapan juga ada, begitu pula fenomena laba-laba manipulasi data, kelembapan temporal, dan variabel kasus yang tidak dimasukkan dalam definisi model.

Uji DW (*Durbin-Watson*) dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi. Autokorelasi orde pertama diuji menggunakan uji *Durbin-Watson*, yang memerlukan intersep konstan untuk dimasukkan dalam model regresi tetapi tidak ada variabel independen.

Deteksi autokorelasi yaitu dengan cara :

- 1) Jika $dw < dL$: Maka terdapat autokorelasi positif
- 2) Jika $dw > dU$: Maka tidak terdapat autokorelasi positif
- 3) Jika $dL > dw > dU$: Maka pengujian tidak dapat disimpulkan
- 4) Jika $(4-dw) < dL$: Maka terdapat autokorelasi negatif
- 5) Jika $(4-dw) > dU$: Maka pengujian tidak terdapat autokorelasi negatif
- 6) Jika $dL < (4-dw) < dU$: Maka pengujian tidak terdapat kesimpulan

d. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen dalam model regresi berkorelasi tinggi atau berkorelasi sempurna. Ketika terjadi multikolinearitas sempurna antar variabel independen, maka nilai standar error menjadi tak terhingga, dan koefisien regresi variabel independen tidak dapat dihitung. Koefisien regresi suatu variabel independen dapat dihitung, namun estimasi nilai koefisien regresi yang tidak akurat tidak dapat dilakukan jika multikolinearitas antar variabel independen besar. Jika akar kuadrat matriks korelasi kurang dari 0,80, maka regresi tersebut dikatakan multikolinearitas.

H_0 : Tidak terjadi multikolinearitas (*correlation matrix* < 0,80)

H_a : Terjadi multikolinearitas (*correlation matrix* > 0,80)

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji t

Meneliti bagaimana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen (parsial) adalah inti dari uji t dalam statistik (Widarjono, 2009).

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. $H_0: \beta_1=0$: Tidak ada pengaruh variabel kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_a: \beta_2 < 0$: Ada pengaruh negatif variabel kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia.

2. $H_0: \beta_2=0$: Tidak ada pengaruh variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia

$H_a: \beta_2 > 0$: Ada pengaruh positif variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kriteria pengujiannya adalah:

a. Jika nilai t-statistik > nilai t-tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a

b. Jika t-statistik < nilai t-tabel maka H_0 diterima

Jika H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

b. Uji F Statistik

Analisis ini akan mengungkap pengaruh interaksi variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2009).

Hipotesis dari penelitian ini:

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya variabel kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2. $H_a : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$, artinya variabel kemiskinan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kriteria pengujiannya adalah:

- a. H_0 ditolak jika nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , yang berarti secara bersama sama, atau salah satu dari variabel independen mempengaruhi dan signifikan terhadap variabel dependen.
- b. H_0 diterima jika nilai $F_{hitung} <$ nilai F_{tabel} , yang berarti secara bersama sama, atau salah satu dari variabel independen tidak mempengaruhi dan tidak signifikan terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (*R-Squared*) mengungkapkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dapat dipertanggungjawabkan oleh variabel tersebut. Selain itu, koefisien determinasi dapat digunakan untuk menilai kedekatan garis regresi yang diperkirakan dengan data. Perkiraan koefisien determinasi (*R-squared*) yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel terikat dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel bebas. Nilai R^2 memiliki interval antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Namun, semakin tidak berhasilnya suatu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, maka koefisien determinasi (*R-Squared*) semakin menjauh dari satu atau mendekati nol. Ketika suatu

variabel independen mempunyai koefisien determinasi yang tinggi, maka variabel tersebut lebih mampu memperhitungkan pergeseran dan fluktuasi variabel dependen.

Koefisien determinasi memiliki kelemahan karena terlalu menekankan kontribusi variabel independen tambahan terhadap kesesuaian model akhir. Akibatnya, banyak akademisi menyarankan untuk menggunakan nilai R² yang dimodifikasi saat mengevaluasi model regresi. Meskipun variabel independen dimasukkan ke dalam model, meskipun tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel dependen, nilai R² yang dimodifikasi dapat naik atau turun (Widarjono, 2009).

d. Efek Individu atau *Individual Effect*

Individual Istilah “efek individu” digunakan untuk menggambarkan variasi atau variasi antar individu atau unit observasi dalam sampel panel dalam konteks regresi data panel. Perusahaan, negara, dan bahkan masyarakat sendiri mungkin dianggap sebagai “individu” dalam konteks data panel. Efek individual dapat dianggap sebagai variabel yang mempunyai dampak konstan terhadap variabel terikat di seluruh sampel. Nilai untuk setiap penampang dikenal sebagai “efek individual”, dan dihitung menggunakan FEM.

$$C_i = C + \beta$$

Keterangan :

C_i = Individual Effect

C = Konstanta

β = Koefisien dari masing-masing Wilayah

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut ini yang diambil dari analisis data dan pembahasan pada penelitian tersebut di atas :

1. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM Wilayah Sumatera Bagian Selatan periode 2016-2021. Tingginya angka kemiskinan di wilayah Sumatera Bagian Selatan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu meningkatnya harga komoditas dan jasa penting, mata pencaharian musiman dan tidak menentu, kurangnya jalan, sekolah, dan infrastruktur ekonomi lainnya, serta mahalnya biaya pendidikan. Pengeluaran per kapita bahkan lebih tinggi sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Koefisien kemiskinan dalam regresi ini adalah $-0,817004$, yang berarti bahwa untuk setiap kenaikan poin persentase kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia akan turun sebesar 0,82 pada kondisi konstan lainnya.
2. Estimasi variabel secara parsial menunjukkan bahwa di Wilayah Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2016-2021, belanja pemerintah di bidang pendidikan mempunyai pengaruh positif dan besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena pada setiap tahunnya, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan meningkat. Alokasi anggaran dipusatkan pada peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, termasuk peningkatan tenaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan melalui berbagai program unggulan misalnya dana BOS yang sudah diterapkan sejak lama, Kartu Indonesia Pintar, program kampus merdeka, dan digilitasi sekolah.

3. Estimasi variabel secara simultan menunjukkan bahwa di Wilayah Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2016-2021, Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi secara signifikan, baik oleh kemiskinan maupun investasi pemerintah pada sektor pendidikan, dengan nilai koefisien sebesar 70,18134. Pembangunan manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan akan tumbuh sebesar 70,18 persen jika kemiskinan dan investasi pemerintah pada pendidikan dihilangkan, dan semua hal lainnya dianggap setara. Dapat dikatakan jika, Indeks Pembangunan Manusia dapat ditingkatkan dengan cara mengatasi permasalahan kemiskinan dan pendidikan pada wilayah Sumatera Bagian Selatan. Karena kedua permasalahan tersebut memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. Hasil Individual Effect dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 4 provinsi dari 5 provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang masih dibawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia nasional dan Provinsi Bengkulu memiliki individual effect yang lebih tinggi dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia nasional.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan agar bisa menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, memberikan modal, memberikan akses lowongan pekerjaan, memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), memberikan program BSM (Bantuan Siswa Miskin), program RASKIN (Beras untuk keluarga miskin). Sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pembangunan manusia di Wilayah Sumatera Bagian Selatan.
2. Pemerintah diharapkan agar bisa meningkatkan jumlah anggaran yang dikeluarkan seperti anggaran pendidikan. Alokasi biaya untuk Pendidikan sebaiknya dialokasikan sebesar 20% bahkan lebih dari total APBD. Dengan begitu, bantuan dana yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan mutu pendidikan, kuota belanja pemerintah dapat membangun sekolah, melengkapi fasilitas Pendidikan, dan perlunya mendidik masyarakat mengenai nilai pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia untuk meningkatkan

kualitas pekerja. Dengan begitu, hal ini dapat membantu masyarakat Sumatera Selatan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan kemajuan manusia.

3. Kualitas sumber daya manusia dan melimpahnya sumber daya alam akan memungkinkan pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan ekonomi yang saat ini sudah cukup baik. Agar masyarakat Wilayah Sumatera Bagian Selatan dapat mengakses tempat tinggal yang lebih baik.
4. Wilayah Sumatera Bagian Selatan merupakan wilayah yang memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan memerlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran dibandingkan dengan provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N., Afif, F. Y., & Peni, T. S. (2021). Krisis Global dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 46–55. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i1.214>
- Apriani, D. (2022). Profesional di Sumbagsel Siap Berkontribusi Membangun di Lima Provinsi. *Media Indonesia Nusantara*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/477896/profesional-di-sumbagsel-siap-berkontribusi-membangun-di-lima-provinsi>
- Arifin. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013. *Digital Repository Universitas Jember*, 3(3), 1–111.
- Arifin, S. (2017). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 1.
- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in Southeast Asia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 118–137. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v2i2.44>
- Arsyad, L. (2006). *Pengantar Perencanaan Pembangunan (Kedua)*. BPFEE.
- Astuti, R. R. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Jumlah Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Ayu, I. N., & Husaini, M. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada sepuluh kabupaten/kota di Propinsi Lampung 2006-2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–15.
- Becker S, G. (1993). Human Capital. In *Notes and Queries* (Ketiga, Vols. s1-IV, Issue 92). <https://doi.org/10.1093/nq/s1-IV.92.83-a>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction Of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i1.1361>

- BPS. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022*. 84.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12.
<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>
- Ciptawaty, U., Putra, J. A., Yulihar, A. R., & Suparta, I. W. (2023). *Determinan Kemiskinan Pada Sepuluh Provinsi di Sumatera Tahun 2015-2021*. 2(2), 495–500.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. PT Refika Aditama.
- Fauzi, A. S., Runtiningsih, S., Hidayat, F., & Kunci, K. (2022). *Determinants of Poverty in Indonesia and its Policy Implications , Multidimensional Approach to Measuring Poverty*. 01(01), 11–23.
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures James. *PhD Proposal*, 1(3), 761–766.
- Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. In *McGraw-Hill Companies* (Empat).
- Gujarati, N. D., & Porter, C. D. (2013). Basic Econometrics. In *McGraw –Hill* (Edisi 5).
- Harahap, R. U. (2011). *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi sumatera utara*. 11(1), 47–58.
- Ilyas, M. (1989). *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2) " Tahap Analisis ". *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, 2, 1–7.
- Irfan, S. B. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Edisi Revi). Raja Grafindo.
- Kementerian PUPR. (2017). Sinkronisasi Program Dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan pengembangan kawasan dengan insfrastruktur PUPR Pulau Sumatera. In *Https://Bpiw.Pu.Go.Id*.
https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buku_1Sumatera.pdf

- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2011). Metode kuantitatif; teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi, edisi keempat. *Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta*.
- Lestari, R. P. (2017). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015. *Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–119.
<http://repository.radenintan.ac.id/1097/>
- Lita Nia, A. (2021). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Investasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., *Mi*, 5–24.
- Mafahir, A., & Soelistiyo, A. (2017). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Pdrb Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 143–152.
- Mangkoesebroto, G. (2016). *Ekonomi Publik* (Edisi Ketii). BPFE.
- Manurung, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Sumatera Bagian Selatan. 66, 37–39.
- Michael, P. T., & Stephen, C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Person Education Limited.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Ipm di Jawa Tengah tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1).
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Nachrowi, N., & Usman, H. (2018). *Ekonometrika Pendekatan Populer dan Praktis untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. 11(1).
<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2863>
- Nisa, H., Afriliani, E., Usman, M., Yuliawan, D., Indeks, T., & Manusia, P. (2023). Pengaruh Belanja Daerah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Lampung. 2(2), 360–367.

- Nur, R. A. A. (2010). *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Alfabeta.
- Nurul, H. dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Pranadamedia Group.
<https://books.google.co.id/books?id=hcSZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ekonomi+pembangunan+islam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj-8N2XgunnAhUbwjgGHWjYCuwQ6AEIKzAA#v=onepage&q=ekonomi+pembangunan+islam&f=false>
- Palenewen, T. O. M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 52–61.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217.
<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663>
- Rahman, A., & Muhammad Fathan Romdhoni. (2020). Penerapan Multiple Overlapping Deprivation Analysis dalam Pembentukan Indeks Kemiskinan Multidimensi Anak di Kalimantan Barat. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 4(2), 61–72. <https://doi.org/10.21009/jsa.04201>
- Ratih, A., Tri Wandita, D., & Gunarto, T. (2022). The Effect of Economic Growth on Multidimensional Poverty. *Journal Research of Social, Science, Economics, and Management*, 1(9), 1413–1421.
<https://doi.org/10.36418/jrssem.v1i9.156>
- Rayhan, A. W. (2020). *Kemiskinan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*.
- Resha, M., & Gunarto, T. G. T. (2015). Pengaruh PNPM Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan, Kesehatan Dan Pekerjaan Umum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi ...*, 4(April), 1–26.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/23218/%0Ahttp://repository.lppm.unila.ac.id/23218/1/11>. Pengaruh PNPM Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Pendidikan%2C Kesehatan Dan Pekerjaan Umum.pdf
- Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*.
- Sen, A., & Anand, S. (1997). Concepts of Human Development and Poverty: A Multidimensional Perspective. In *Poverty and Human Development: Human Development Papers 1997* (pp. 1–20). United Nations Development Programme.

- Soediyono, H. R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Erosco.
- Suparmoko, M. (1994). *Keuangan Negara*.
[https://repository.penerbitwidina.com/publications/346505/%0Afiles/1099/Enas et al. - 2021 - KEUANGAN NEGARA.pdf%0Afiles/1100/Enas et al. - 2021 - KEUANGAN NEGARA.html](https://repository.penerbitwidina.com/publications/346505/%0Afiles/1099/Enas%20et%20al.%20-%202021%20-%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf%0Afiles/1100/Enas%20et%20al.%20-%202021%20-%20KEUANGAN%20NEGARA.html)
- Syahputra M, H. (2019). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Lima Provinsi Dengan IPM Tertinggi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2017. *Journal Information*, 2(30), 1–17.
- Syahrani, A. (2018). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Studi Kasus Di Kabupaten Pesawaran*, 1–147.
<http://repository.radenintan.ac.id/4442/>
- Syam, S. F. (2014). *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan ipm terhadap pertumbuhan ekonomi sulawesi selatan*.
- Teniwut, M. (2022, September 5). Urutan Lima Pulau Terbesar di Indonesia. *Media Indonesia Humaniora*.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/520277/urutan-lima-pulau-terbesar-di-indonesia>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Economic Development* (Edisi delata).
<https://archive.org/details/economicdevelopm8thtoda/page/n19/mode/2up#reviews>
- UNDP. (1990). Human Development Report. In *Economic Annals-XXI* (Vol. 184, Issues 7–8). <https://doi.org/10.21003/EA.V184-03>
- Universitas Lampung. (2020). *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Usmaliadanti, C. (2011). Analisis Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi JawaTengah Tahun 2007-2009. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Wahid, B. A. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2011. *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 103–113.

- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: *Ekonisia*.
- Winarti, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012. *Universitas Diponegoro*, 1–72.
- Yu, Y., & Huang, J. (2021). Poverty Reduction of Sustainable Development Goals in the 21st Century: A Bibliometric Analysis. *Frontiers in Communication*, 6(October), 1–15.
<https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.754181>
- Zulham, T., Seftarita, C., & Muliza. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69.